

**PERFORMASI DAN PENGEMBANGAN HUMAN DEVELOPMENT
DI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS**

(Studi Kasus Kabupaten Jember)

SKRIPSI



MIRK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember



Terima
No. Induk :
Oleh :
Tgl. 21 NOV 2002
Klass
331.11
SAN
p
e.1

Widy Eaurus Sandy

NIM. 980810101272

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

JUDUL SKRIPSI

PERFORMASI DAN PENGEMBANGAN HUMAN DEVELOPMENT
DI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
(Studi Kasus Kabupaten Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : WIDY TAURUS SANDY

N. I. M. : 980810101272

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

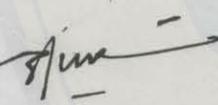
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

16 NOPEMBER 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

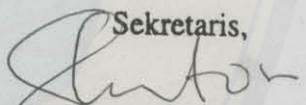
Ketua,


Drs. Badjuri, ME

NIP. 131 386 652

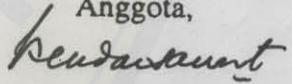


Sekretaris,


Siswoyo Hari S., SE, M.Si

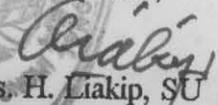
NIP. 132 056 182

Anggota,


Dra. Ken Darsawarti, MM

NIP. 130 531 975

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Performasi dan Pengembangan *Human Development* di
Jawa Timur dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy
Process* (Studi Kasus Kabupaten Jember)

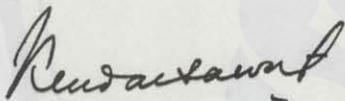
Nama Mahasiswa : Widy Taurus Sandy

N I M : 980810101272

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Pembimbing I



Dra. Ken Darsawarti, MM

NIP. 130 531 975

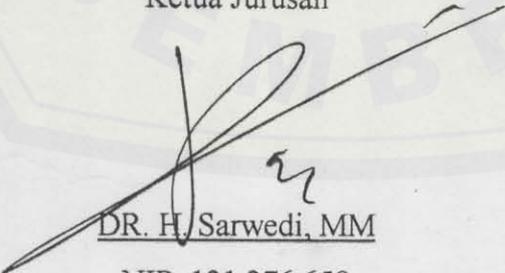
Pembimbing II



Dra. Sebastiana Viphindartin, MKes

NIP. 131 832 296

Ketua Jurusan



DR. H. Sarwedi, MM

NIP. 131 276 658

Tanggal persetujuan : November 2002



Karya kecil ini saya persembahkan kepada :

- ❖ **Allah SWT** atas nikmat dan rahmat yang selalu dilimpahkan-Nya.
- ❖ **Ibunda Noviana Yunani, SKM** dan **Papa Purbo Tri Handoyo** serta orang tuaku yang lain atas cinta, kasih dan sayang serta doa yang mengiringi perjalanan hidup saya.
- ❖ **Agama, Ilmu pengetahuan dan almamaterku** tercinta

Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu berharap.”

(QS Al-Insyiroh : 5-8)

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”

(QS Al-Baqarah : 45)

“Pelajarilah ilmu. Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa. Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang-ulangnya itu tasbih. Membahasnya, itu Jihad.

Mengajarkannya orang yang tidak tahu, itu sedekah.

Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Allah.”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban, Ilyas Al-Ghazali, 1986)

“Dalam harapan, proses dan tujuan, hanya proses-lah yang memiliki manfaat dan kekekalan yang paling besar dan paling hakiki.”

(Widy Taurus Sandy)

KATA PENGANTAR

Rasa syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat, waktu dan petunjuk dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul “Performasi dan Pengembangan *Human Development* di Jawa Timur dengan Pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (studi kasus Kabupaten Jember)”.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Dra. Ken Darsawarti, MM dan Ibu Dra. Sebastiana Viphindartin, Mkes selaku dosen pembimbing, atas komentar, saran, bantuan, kesabaran dan kesediaannya membaca dan membimbing dari awal penulisan proposal hingga menjadi bentuk tulisan lengkap seperti sekarang.
2. Bapak Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas ekonomi Universitas Jember serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
3. Mas Adhitya Wardhono, SE, M.Si atas koreksi, bantuan, motivasi, teman diskusi dan dukungannya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah banyak membantu proses administrasi skripsi ini.
5. Keluarga besar Bapak Soehardono di Jl. Bangka II/2 Jember (Bapak dan Ibu, Mas Bhim, Mbak Vita, Mas Prabha, Vanti, serta Rissa) atas kehangatan suasana, kesediaan tempat dan perpustakaanannya dalam membuat penulisan skripsi ini.
6. Mbak Ciplis sebagai sahabat, partner dalam belajar metodologi dan teman diskusi saat penulis sedang *brainlock* dalam pembuatan skripsi ini.
7. Mas Agung Nusantara (dosen STIEKUBANK Semarang), Bapak Jani Rahardjo (dosen UPETRA Surabaya), Mas Rokhedi (PAU-UGM Yogyakarta) atas komplemen ide dan *software* tentang AHP.

8. Adik-adik saya yang tercinta : Shinta, Deddy dan Anne.
9. **“Ida”** (Lilik Faridah) atas keikhlasannya, motivasi, dukungan serta penerangannya sebagai lentera hati dalam hidup saya dan bantuannya untuk bangun dari kegelapan
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di FE-UNEJ khususnya angkatan 1998.
11. Rekan-rekan sekerja penulis di CV. OMEGAPLUS yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kesibukan, canda dan tawa.
12. Teman-teman KKN magang kelompok **“AK”** tahun 2001 di RSUD Dr. Haryoto Lumajang (Ida, Yuke, Lis, Lina, Maya, Doddy, Gembo, dan Jun).
13. Surya, Suryani, Risa Dwianingtyas, Risa Sanderiana, Rini, Tyas, Rully, Ade, Feriyanti, Betty, Enok, sebagai teman senasib dalam proses pembuatan skripsi.
14. Keluarga induk semang dan teman-teman kost di Jalan Bangka II / 12.
15. Semua pihak yang membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis siap menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia.....	13
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.2.3 Teori Pembangunan Ekonomi.....	16
2.2.4 Teori <i>Human Development</i>	18
2.2.5 Teori <i>Human Capital</i>	20
2.2.6 Teori Investasi Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi.....	23

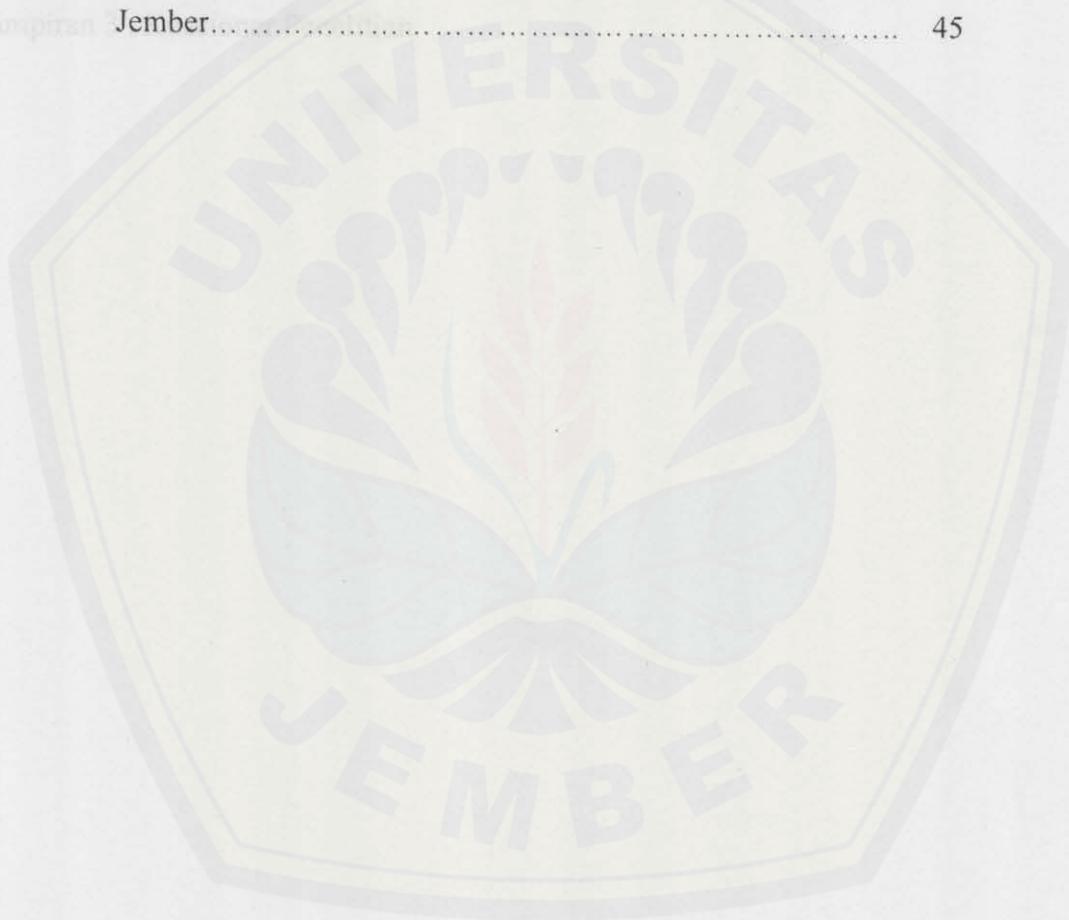
2.2.7 Relevansi <i>Human Development</i> dan Pertumbuhan Ekonomi.....	24
III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.1.1 Jenis Penelitian.....	28
3.1.2 Unit Analisis.....	28
3.1.3 Populasi.....	28
3.2 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.3 Metode Analisis Data.....	29
3.3.1 Alasan Penggunaan <i>Analytic Hierarchy Process</i>	29
3.3.2 Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i>	30
3.3.3 Aksioma Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i>	31
3.3.4 Prinsip Kerja AHP.....	32
3.3.5 <i>Eigenvector</i> dan Konsistensi.....	37
3.4 Penerapan AHP Pada Penelitian.....	40
3.4.1 Pembentukan Model AHP dan Hirarki.....	40
3.4.2 Pengisian Kuesioner.....	46
3.5 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran.....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	48
4.2 Analisa Data.....	51
4.2.1 Hasil Pengumpulan Data.....	51
4.2.2 Hasil Penghitungan Data.....	52
4.2.3 Pembahasan Hasil Penghitungan.....	62
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
3.1 Skala AHP.....	34
3.2 Indeks Random.....	37
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja.....	48
4.2 Rekap hasil kuesioner Performasi <i>Human Development</i> di Jember....	52
4.3 Performasi Sub-Kriteria <i>Human Development</i> di Jember.....	54
4.4 Performasi kriteria <i>Human development</i> di Kabupaten Jember.....	55
4.5 Rekapitulasi pendapat <i>stakeholder</i> terhadap tujuan.....	56
4.6 Rekapitulasi kuesioner <i>stakeholder</i> terhadap kriteria.....	56
4.7 Rekapitulasi pendapat <i>stakeholder</i> terhadap sub-kriteria pada kriteria <i>Life Expectancy</i>	57
4.8 Rekapitulasi pendapat <i>stakeholder</i> terhadap sub-kriteria pada kriteria <i>Education</i>	57
4.9 Rekapitulasi pendapat <i>stakeholder</i> terhadap sub-kriteria pada kriteria PDBriil.....	58
4.10 Pembobotan pendapat <i>stakeholder</i> terhadap kriteria dan sub-kriteria.....	59
4.11 Pembobotan pendapat <i>stakeholder</i> terhadap prioritas alternatif.....	60
4.12 Prioritas alternatif <i>human development policy</i> di Kabupaten Jember...	61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
Gambar 1: pendekatan terpadu perencanaan SDM.....	25
Gambar 2: siklus HD dan GNP.....	26
Gambar 3: performasi <i>Human Development</i> di Kabupaten Jember.....	43
Gambar 4: pengembangan <i>Human Development Policy</i> di Kabupaten Lampiran Jember.....	45





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam berbagai dimensi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan yang seluas – luasnya bagi masyarakat yang melaksanakannya. Berdasarkan tendensi tersebut maka pembangunan ekonomi sendiri mengandung arti yang cukup luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dimana hal tersebut juga merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat atau pelaku ekonomi yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994:1). Jika diartikan secara khusus, pembangunan ekonomi dapat disinyalir sebagai usaha untuk memperbesar pendapatan perkapita dan menaikkan produktivitas perkapita dengan jalan menambah neralatan modal dan menambah *skill* (kemampuan) dari masyarakatnya (Djojohadikusumo, 1955:39). Pada prinsipnya, sebenarnya proses pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi masyarakat, selalu mengupayakan dinamika alokasi faktor – faktor produksi yang efektif dan efisien, agar dapat digunakan seoptimal mungkin bagi masyarakat. Pengalokasian faktor – faktor produksi yang ada selalu terkait dengan penggunaan sumber daya yang ada (sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Proses pengalokasian itu merupakan modal yang cukup berarti dalam proses pembangunan. Relevansi antara sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan SDA yang baik tanpa didukung oleh SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas akan sulit untuk dapat mengalokasikannya menjadi suatu produk yang berdaya guna dalam suatu proses pembangunan. Namun dalam beberapa kasus, keberadaan SDA yang

kurang baik dengan didukung oleh keberadaan SDM yang berkualitas mampu pula menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti.

Secara historis, dapat kita lihat perbandingan pada negara-negara di kawasan Asia Timur dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya alam di kawasan Asia Timur tidak sebanyak di kawasan Asia Tenggara, namun pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara (kecuali Singapura) masih tertinggal jauh dengan negara-negara di kawasan Asia Timur. Dari fenomena tersebut dapat kita lihat bahwa keberadaan alokasi SDM dengan kualitasnya yang prima mampu menguasai SDA secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan manusia secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu proses pembangunan sangatlah penting untuk diperhatikan serta merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi proses pembangunan.

Secara holistik, keberadaan manusia sebagai subyek pelaku pembangunan menempatkannya sebagai dua fungsi penting dalam dinamika perekonomian yaitu, pertama sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi, dan kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar. Dua fungsi tersebut merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan suatu negara (Suroto, 1992:53). Selain itu alasan dari pernyataan tersebut adalah karena dalam proses pembangunan yang terjadi, dilaksanakan untuk manusia dan oleh manusia itu sendiri. Menurut Hasibuan (1996:20), hal tersebut memunculkan tiga dimensi dari eksistensi manusia dalam pembangunan, yaitu sebagai penguasa atau pengambil keputusan dalam pembangunan, sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan, dan sebagai penerima hasil pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat, yang kesemuanya tersebut harus dilihat sebagai suatu proses yang terintegrasi secara holistik.

Sebagai salah satu faktor produksi, manusia memerlukan investasi yang optimal dari suatu proses produksi, dalam hal ini adalah pembangunan ekonomi. Langka dan minimumnya investasi sumber daya manusia dapat menerangkan sebab – sebab terjadinya keterbelakangan di suatu negara. Menurut Rachbini (2001:122) kondisi *low of human capital* tersebut ditandai oleh besarnya sumber

sangat riskan, mengingat Jawa Timur dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, kuantitas penduduk yang cukup banyak, serta memiliki sektor industri yang lebih dari cukup hanya mampu menempati urutan HDI ke-22 dari 26 propinsi di Indonesia.

Kabupaten Jember, sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur, juga memiliki karakteristik indeks dari pembangunan manusia yang cukup menarik. UNDP dalam laporannya menyebutkan bahwa Kabupaten Jember hanya memiliki indeks sebesar 54,9 dan menempati peringkat 276 dari 294 kabupaten yang ada di Indonesia. Padahal, jika dilihat dari kemampuan atau performansi ekonominya, Jember termasuk daerah dengan kekayaan alam yang cukup banyak terutama produk pertaniannya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan menjadikan Kabupaten Jember sebagai obyek dari studi kasus performansi dan pengembangan *Human Development* di Propinsi Jawa Timur. Indeks yang dicapai tersebut juga tidak dapat lepas dari peranan pemerintah sebagai suatu lembaga sosial-formal, yang dengan otoritasnya sebagai penyedia dan pengawas sarana publik, harus mampu berkompeten dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Performansi (kinerja atau pelaksanaan yang telah dilakukan) *Human Development* di Kabupaten Jember dapat memberikan gambaran dari hasil pembangunan manusia di Jember, serta dapat pula digunakan sebagai bahan referensi dalam prioritas penentuan kebijakan-kebijakan dan alokasi investasi oleh pemerintah terhadap pembangunan khususnya mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan manusia sebagai salah satu proses, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dalam menghadapi pembangunan beserta globalisasi yang mengiringinya. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus mendapat suatu prioritas tersendiri oleh pemerintah, agar dapat menciptakan modal non-fisik sebagai pendukung modal fisik yang ada ataupun yang akan ada. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, investasi non-fisik sering mendapat

prioritas sekunder dari pemerintahnya sehingga dapat mengakibatkan kurangnya kualitas modal non-fisik tersebut.

Begitu pula dengan Kabupaten Jember, sebagai sebuah *region* yang sedang berkembang dapat dilihat melalui performansi *Human Development*-nya (berdasarkan fakta dan data yang ada), maka muncullah suatu fenomena dari kurang optimalnya proses pembangunan manusia di Jember yang ditandai dengan nilai indeks HDI Jember (data yang ada adalah pada tahun 1999 dan 2000) yang masih menunjukkan angka sebesar 54,9 (termasuk kategori “rendah” karena dibawah indeks 60). Dari kajian tersebut, maka muncullah suatu pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah performansi *Human Development* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jember pada masa kurun waktu tahun 2000 hingga 2002?
2. Berdasarkan performansi tersebut maka bagaimanakah Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan prioritas *Human Development Policy* yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan modal non-fisik (kualitas sumber daya manusia), terkait dengan kompleksnya permasalahan serta keterbatasan dana yang ada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) performansi *Human Development* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jember sehingga dapat diketahui alternatif-alternatif kebijakan yang dominan secara holistik-ekonomi terhadap pembangunan manusia; (2) dari performansi yang ada, maka nantinya dapat pula diketahui prioritas kebijakan yang mendukung pembangunan manusia secara holistik-ekonomi di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

II. TINJAUAN PUSTAKA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai performansi *Human Development* khususnya di Indonesia disajikan dalam *Indonesia Human Development Report 2001* yang dilaksanakan oleh *United Nation of Development Program* (UNDP) dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2001 tersebut disajikan beberapa data – data yang terkait dengan pembangunan manusia secara keseluruhan (*Human Development Index, Human Poverty Index, Gender-Related Development Index, Gender Empowerment Measure, Health Condition, School Attendance, Housing Condition, Economic Performance, Labour Force and Poverty Condition*).

Laporan penelitian ini menghasilkan dan menyajikan data mengenai pembangunan manusia dan menghitung performansinya melalui indeks pengukuran sederhana yaitu *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kombinasi dari PDB_{riil} perkapita, usia harapan hidup dan pendidikan terakhir yang dicapai terhadap 294 kabupaten / kota di Indonesia. Dari penelitian tersebut menghasilkan analisa bahwa secara umum pembangunan manusia di Indonesia mencapai kemajuan dengan menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dengan nilai IPM sebesar 68 pada tahun 2001 jika dibandingkan pada tahun 1999 yang menempati peringkat 109 dengan nilai IPM sebesar 64,3. Dari IPM tersebut dibentuk suatu peringkat yang menempatkan Jakarta Selatan pada peringkat teratas dengan IPM 75 dan Kabupaten Paniai di Papua pada peringkat ke 294 dengan IPM 44. Propinsi Jawa Timur, menduduki peringkat ke 22 dari 26 propinsi dengan nilai IPM 61,8. Sedangkan Kabupaten Jember sendiri menempati peringkat ke 276 dengan indeks sebesar 54,9 dari 294 kabupaten / kota di Indonesia. Nilai tersebut dihitung dari angka harapan hidup 59,7 tahun; persentase melek huruf dewasa 72,5%; rata –rata lama pendidikan 4,4 tahun dan PDB_{riil} yang disesuaikan sebesar 570.400 Rupiah.

Penelitian ini juga memaparkan secara mendalam transisi demokrasi dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia untuk menunjukkan, betapa sulitnya mempertahankan tingkat kemajuan ekonomi yang pernah dicapai dan untuk mengkonsolidasikan demokrasi, kecuali jika Indonesia mewujudkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan manusia. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan konsensus yang disepakati oleh semua elemen di tingkat pusat dan daerah mengenai pentingnya pembangunan manusia akan menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Penelitian lain yang terkait secara metodologi dengan penelitian ini adalah *A Study of Decentralization based on the Regional Perspective; The Application of "Analytic Hierarchy Process"* oleh Azis (1992). Pendekatan aplikasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ini menangkap perspektif atau persepsi masyarakat yang terlibat secara mendalam dengan masalah yang sedang diteliti, dimana prosedur yang digunakan dalam pendekatan ini pada akhirnya sampai pada skala preferensi atas beberapa alternatif tindakan yang tersusun dalam suatu hirarki.

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebuah *forward projection* atas prioritas kebijakan dari program desentralisasi di Riau. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlunya meningkatkan peranan sebenarnya dari Pemerintah Daerah dalam hampir semua aspek pengambilan keputusan yang memang dianggap sebagai siasat peningkatan desentralisasi yang diinginkan. Selain itu dikemukakan pula adanya dua syarat yang paling penting bagi keberhasilan desentralisasi di Riau yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dengan nilai prioritas sebesar 0,358 serta melalui pengadaan program pelatihan yang efektif bagi staf setempat (0,297). Kebijakan lain adalah pemindahan otoritas untuk memungut pendapatan daerah (0,161) dan mengurangi *time-lag* input dan DIP (Dana Investasi Proyek) sebesar 0,130 serta menyederhanakan birokrasi (0,053). Hasil lain yang menjadi prioritas utama namun sedikit kurang biasa dalam konteks desentralisasi adalah terbukti berhubungan eratnya dengan keyakinan responden bahwa di masa depan investasi

swasta yang akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan dan pembangunan selanjutnya di Riau.

Penelitian lain yang terkait menurut subyeknya adalah “Pembangunan Yang Berimbang di Jawa Timur dalam Orde Baru” oleh Dick, dkk (1997). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan tentang kebijaksanaan pembangunan berimbang yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Jawa Timur selama 20 tahun sangat meyakinkan dengan laju pertumbuhan yang baik, meskipun prosesnya tidak bersandar pada industrialisasi yang dirangsang oleh ekspor (*eksport-led industrialization*). Pembangunan yang berimbang dalam konteks ini adalah komposisi sektoral, distribusi pendapatan dan keadilan regional. Akan tetapi, sekalipun sudah dilaksanakan pembangunan, jutaan penduduk Jawa Timur masih di bawah garis kemiskinan, belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri (Dick, 1997:31-32).

Perubahan pendidikan dan struktur tenaga-kerjaan yang mengalami perubahan juga disinggung dalam penelitian ini. Struktur tenaga-kerjaan di Jawa Timur masih dalam tahap-tahap awal diversifikasi dari suatu basis pertanian ke basis perkotaan industri yang lebih kompleks (Jones, 1997:139) dikarenakan kaum muda yang berpendidikan lebih cenderung meninggalkan sektor pertanian.

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Subagiarta (1995) dengan judul “Mutu Modal Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Tingkat II Jember”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk di pedesaan menurun secara cepat dibanding daerah perkotaan, hal ini ditunjukkan pada daerah urban penduduknya meningkat rata-rata 2,68% per tahun, sedangkan di desa hanya rata-rata 0,52% per tahun. Secara total, peningkatan penduduk di Jember selama 10 tahun (1980-1990) adalah sebesar 0,93%.

Pendistribusian lapangan kerja pada sensus tahun 1990 adalah 53,82% di sektor pertanian; 0,53% di sektor pertambangan; 1,35% di sektor pengolahan; 0,13% di sektor gas, air dan listrik; 3,07% di sektor bangunan; 5,56% di sektor perdagangan, restoran dan hotel; 3,78% di sektor transportasi dan komunikasi; 0,49% di sektor keuangan dan perbankan; serta 10,94 di sektor jasa-jasa. Dilihat

dari sisi produktivitas, sektor keuangan dan perbankan menempati posisi teratas, sedangkan yang terendah adalah sektor pertambangan dan galian.

Tingkat kesehatan dan pendidikan juga mendapat sorotan pada penelitian ini. Pada tahun 1986, angka kematian yang paling dominan adalah infeksi saluran pernafasan akut (21,30%) kemudian infeksi kulit dan bawah kulit (7,6%), gigi dan mulut serta saluran pencernaan (6,9%), infeksi lain-lain (6,5%), bronchitis dan asma serta saluran pernafasan (6,4%), penyakit susunan syaraf (5,7%), penyakit jantung dan pembuluh darah (5,3%), diare (4,4%), serta tuberkolosis (4,2%). Disebutkan, selain adanya transisi demografis, disertai pula dengan transisi epidemiologi (proses terjadinya perubahan pola penyakit dan penyebab kematian). Tingkat kesehatan yang rendah dapat dipacu dari pendidikan yang rendah dengan gizi yang rendah pula sebagai akumulasi dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya.

Dari sisi pendidikan, Jember masih sangat memungkinkan adanya peningkatan kualitas, namun rasio murid dengan sekolah masih rendah jika dibanding dengan tingkat pendidikan lain yaitu 1:1490, sedangkan rasio tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan di jenjang TK (Taman Kanak-kanak) yaitu sebesar 1:49. Dilihat secara perekonomian, berdasarkan PDRB atas harga berlakunya selama 7 tahun, Kabupaten Jember mampu meningkatkannya dari Rp.604.004,25 juta pada tahun 1983 menjadi Rp. 1.504.071,74 juta pada tahun 1990 dengan rata-rata 13,92% per tahun.

Masalah pokok mutu modal manusia yang dihadapi di Kabupaten Jember adalah pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pendidikan, pendapatan atau upah buruh dan pemenuhan kecukupan zat gizi (kalori dan protein). Berdasarkan masalah tersebut maka penelitian ini memberikan solusi positif melalui penyerapan potensi angkatan kerja yang sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan pertambahan kesempatan kerja. Selain itu pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya masih perlu dipacu lagi.

Tinjauan penelitian sebelumnya yang terkait secara obyek adalah "Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Laju Pembangunan Pedesaan Jawa Timur: Studi Kasus Desa Andongsari dan Desa Antirogo Kabupaten Jember

(Heidar, 1992). Dalam penelitian ini disebutkan bahwa konsentrasi pembangunan di sektor pertanian melalui usaha peningkatan tanaman, khususnya tanaman pangan. Peningkatan produksi pertanian membawa dampak pertumbuhan industri keluarga dan kerajinan rakyat, perdagangan dan transportasi serta tingkat pendidikan masyarakatnya.

Pendapatan masyarakat di 2 desa tersebut tergolong cukup (lebih dari Rp. 30.000,-) sehingga dalam kategori tidak miskin. Sumbangan dana dari masyarakat untuk menunjang pembangunan desa relatif besar sehingga masyarakat memiliki peran aktif bagi pembangunan di desanya.

Ada beberapa saran yang diberikan melalui hasil penelitian ini, saran – saran tersebut antara lain adalah peningkatan peran KUD, peningkatan pendidikan dan ketrampilan masyarakat, pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat. Untuk peningkatan kesehatan penduduknya, disarankan untuk membuat jamban keluarga bagi yang belum memiliki. Selain itu akses informasi bagi sektor pertanian perlu lebih intensif dan berkualitas.

Penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini adalah “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Fasilitas Umum terhadap Kematian Bayi di Kabupaten Jember, Jawa Timur” (Purbangkoro, 1991). Penelitian ini memaparkan angka kematian bayi di Jember yang mengalami penurunan dari 129 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 1980 menjadi 48,30 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 1991. Pendapatan keluarga cukup berpengaruh pada kematian bayi, hal ini terkait melalui kemampuan standar pemenuhan kebutuhan, kesehatan lingkungan dan perawatan bayi, tetapi tidak berpengaruh pada aktivitas imunisasi. Pendidikan ibu juga berpengaruh terhadap angka kematian bayi melalui imunisasi, kesehatan lingkungan dan juga perawatan bayi pasca melahirkan.

Fasilitas umum ternyata tidak berpengaruh terhadap imunisasi sebagai usaha preventif tetapi berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan perawatan bayi. Teori Mosley dan Chen ternyata tidak seluruhnya dapat berlaku di Kabupaten Jember sehingga perlu modifikasi melalui usaha preventif yang berupa imunisasi.

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah peningkatan hidup sehat melalui pendidikan formal, pengajian dan Posyandu; pelayanan kesehatan secara gratis

(misal: imunisasi); penambahan anggaran dana pemerintah untuk kesehatan masyarakat; penyediaan fasilitas umum yang sehat dan ramah lingkungan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Dalam suatu proses produksi diperlukannya faktor – faktor produksi yang menjadi bahan utama dari proses tersebut. Salah satu faktor produksi yang penting adalah sumber daya manusia yang terkait secara kuantitas (jumlah tenaga kerja) maupun kualitasnya (*skill*, sehat, pandai, kreativitas, iman dan taqwa), sehingga manusia merupakan faktor produksi yang penting selain tanah, teknologi dan modal (Effendi, 1995:6).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan (Djojohadikusumo, 1994:197). Sumber daya manusia sendiri posisinya menjadi sentral diantara keempat dinamika tersebut, khususnya di negara–negara sedang berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Berpegang pada dalil diatas maka masalah penduduk dan angkatan kerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, wajib diberi perhatian utama dalam ekonomi pembangunan. Dari fenomena tersebut maka Djojohadikusumo (1994:197-203) menjelaskan bahwa mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi suatu faktor dominan karena sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang nantinya membawa efek positif terhadap kurangnya laju pertumbuhan penduduk (aspek kuantitas).

Selain itu faktor yang perlu diperhatikan juga adalah faktor tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenjang usia karena hal ini terkait dengan kemampuan dan kesediaan penduduk untuk secara aktif mencari dan mendapatkan pekerjaan yang bersifat produktif. Pemenuhan kebutuhan penduduk tergantung sekali dari hasil kegiatan angkatan kerja secara produktif melalui pendapatan riil yang memadai. Hal ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang

konstruksi, pertanian dan produksi primer lainnya serta peranan pemasaran dan teknologi komunikasi, yang secara otomatis menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk mengaplikasikan dalam kehidupannya.

2.2.3 Teori Pembangunan Ekonomi

Teori – teori pembangunan ini muncul dari upaya penyelesaian keadaan stagnasi ekonomi di negara – negara sedang berkembang, dimana prasyarat pembangunan ekonomi yang ditempuh adalah melalui pendobrakan dan terobosan secara sadar untuk keluar dari belenggu stagnasi ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut Djojohadikusumo (1994:61) merupakan sebuah transisi dari keadaan stagnasi ke arah tahap perkembangan secara terus–menerus berdasarkan kekuatan–kekuatan dinamika dalam gerak kemajuan yang telah diciptakan.

Lewis (dalam Todaro, 2000:103) memelopori cara memandang proses pembangunan sebagai suatu transisi sekaligus mengandung transformasi dalam perkembangannya sebagai pembangunan berkesinambungan (*self-sustaining growth*). Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi memerlukan strategi dalam pelaksanaannya sehingga tercapai target – target yang ingin diraih, itulah yang mendasari model pembangunan Rosenstein-Rodan dengan teori "Big Push"-nya (dalam Djojohadikusumo, 1994:98). Teori ini berkeyakinan untuk membangun perekonomian negara sedang berkembang, diperlukan investasi pada skala besar secara bersamaan di segala bidang dengan aktivitas pembangunan yang saling melengkapi. Investasi yang dilakukan dalam bentuk barang publik (infrastruktur dan prasarana) yang menjadi pendorong bagi investasi – investasi lain.

Antitesis dari teori pembangunan seimbang tersebut adalah strategi pembangunan tidak seimbang untuk menuju pada struktur ekonomi yang lebih berimbang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Hirschman (Djojohadikusumo, 1958:103). Penekanannya adalah segi keterikatan (*linkage*) antara berbagai sektor dan kegiatan ekonomi sehingga diperlukannya kebijaksanaan yang matang untuk memusatkan investasi pada proyek – proyek dengan keterikatan yang mencakup banyak mata rantai kegiatan ekonomi dan

dapat memperluas dampak (*forward linkage* dan *backward linkage*) hubungan keterikatan tersebut. Keadaan *disequilibrium* itulah yang bisa menimbulkan gerak kekuatan – kekuatan dalam rangka pembangunan (Djojohadikusumo, 1994:105). Untuk itu, peran aktif negara dan pemerintahan harus mampu mengeluarkan kebijaksanaannya sebagai upaya pembangunan ekonomi.

Dalam perspektif Myrdal (dalam Djojohadikusumo, 1994:112), pembangunan ekonomi terkait dengan upaya penanganan ketimpangan dan kesenjangan dalam masyarakat melalui kebijaksanaan pemerintah pada perubahan struktur kekuasaan politik (dengan membatasi kekuasaan politik), pendidikan masyarakat dalam arti luas serta pembinaan kelembagaan pergaulan hidup. Jadi kesan penciptaan distribusi kesejahteraan menjadi pilihan utamanya dalam proses pembangunan.

Djojohadikusumo (1994:129) mencoba mensintesis teori pembangunan ekonomi yang ada dengan mengkaji kemajuan ataupun kemunduran suatu bangsa dipengaruhi oleh interaksi (pengaruh timbal-balik) antara peranan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kekayaan alam, dan kapasitas produksi yang sudah terpasang. Dari faktor – faktor tersebut memunculkan fungsi produksi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang yaitu :

$$O = Y = f(Hr, Sc+T, Nr, K)$$

keterangan :

O = produk nasional (*national output*)

Y = pendapatan nasional (*national income*)

Hr = sumber daya manusia (*human resources*)

$Sc+T$ = ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*)

Nr = sumber daya alam (*natural resources*)

K = kapasitas produksi berupa modal fisik (*physical capital available*)

Dalam perkembangan jangka panjang, keempat faktor dinamika tersebut sebagai kekuatan yang bersifat endogen dengan interaksi yang masih dipengaruhi oleh kekuatan yang bersifat eksogen (kondisi politik, perang, dsb). Selain itu, fungsi produksi dalam ekonomi pembangunan adalah suatu kombinasi yang

proporsional ataupun kombinasi optimal diantara sumber – sumber daya produksi yang terlibat dalam proses produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas karena adanya pertimbangan fungsi kesejahteraan masyarakat.

2.2.4 Teori Human Development

Manusia, sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek yang dikenai dalam pembangunan tersebut, sehingga diperlukannya kajian dan usaha dalam membangun keberadaan manusia itu sendiri agar dapat berdaya guna optimal sebagai suatu unsur terpenting dalam pembangunan ekonomi. Definisi dari pembangunan manusia dalam *Human Development Report* (UNDP,1990) adalah proses untuk memperbesar pilihan–pilihan manusia. Pilihan–pilihan kritis dari spektrum pilihan itu adalah usia harapan hidup yang lebih panjang dan kehidupan yang sehat, pendidikan dan akses pada sumber daya yang dibutuhkan bagi standar hidup yang layak. Pilihan – pilihan lain mencakup kebebasan politik, jaminan Hak Asasi Manusia, dan penghargaan atas pribadi.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan produksi dan distribusi komoditas serta perluasannya sebagaimana penggunaan kapasitas-kapasitas yang bersifat humanis. Pendekatan ini meneropong berbagai fenomena dalam masyarakat seperti : pertumbuhan ekonomi; perdagangan ketenagakerjaan; kebebasan politik; dan nilai – nilai kultural dari perspektif masyarakat, selain itu juga disinggung mengenai isu kritis tentang budaya seperti kesetaraan jender dalam kehidupan (UNDP, 2001). Menurut pendekatan ini juga memberikan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan utama, tetapi lebih banyak sebagai alat untuk memperbesar pilihan–pilihan manusia tersebut.

Salah satu tolok ukur keberhasilan dari pembangunan manusia adalah dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang bisa didukung oleh tiga hal, yaitu: pendidikan dalam arti luas, keterbukaan dan persaingan serta stabilitas makro-ekonomi (The World Bank, 1991:46).

Dalam pembangunan manusia, sebagai sumber dinamika pembangunan yang efektif , peningkatan mutu berpikir jelas merupakan awal dari peningkatan mutu tindakan dan perilaku manusia. Pelaku pembangunan (dalam hal ini adalah

(3) perumusan perencanaan tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang penyerapan dan pengembangan tenaga kerja.

Tujuan akhir dari proses implementasi kebijakan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah suatu fase peningkatan produktivitas yang dapat memperkecil rasio ketergantungan penduduk baik secara kependudukan maupun di dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, yang secara otomatis akan dapat memperbesar pula pilihan-pilihan manusia terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.

1.2.5 Teori *Human Capital*

Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan dari pekerjaannya melalui peningkatan pendidikan yang telah ditempuhnya. Setiap penambahan satu tahun pendidikan (sekolah, pelatihan, kursus, atau pendidikan non-formal lainnya) berarti, di satu pihak, dapat meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi, di pihak lain, dengan pendidikan maka dapat menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti pendidikan tersebut, serta harus mengeluarkan biaya pendidikan.

Dalam tulisannya, Simanjuntak (1985:59) mencontohkan seorang tamatan SLTA yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan langsung mencari serta memperoleh pekerjaan. Tiap tahun t dia memperoleh upah $V(t)$. Misalkan orang tersebut tamat dan memperoleh pekerjaan pada umur 20 tahun, dan tidak memperoleh penghasilan lagi pada umur 60 tahun atau sesudah 40 tahun bekerja. Maka jumlah penghasilah yang diterimanya seumur hidupnya, dihitung dalam nilai sekarang atau *Net Present Value* adalah :

$$Y(sla) = \sum_{t=0}^{40} \frac{V(t)}{(1+r)^t}$$

Ket : $Y(sla)$ = nilai sekarang (*net present value*) dari arus penghasilan seumur hidup;

$V(t)$ = besarnya penghasilan pada tahun ke- t ;

r = *discount rate* yang menggambarkan *time preference* seseorang atas konsumsi barang saat sekarang dibandingkan dengan satu tahun yang akan datang

Seorang tamatan SLTA yang melanjutkan sekolah untuk menjadi sarjana muda, setiap tahun sampai menjadi sarjana muda akan mengeluarkan biaya secara langsung sebesar $C(t)$. Misalkan untuk menjadi sarjana muda, seorang tamatan SLTA memerlukan 4 tahun. Maka jumlah biaya selama tambahan pendidikannya tersebut adalah :

$$B = \sum_{t=0}^3 \frac{C(t)}{(1+r)^t}$$

Dengan telah menjadi sarjana muda, seseorang dapat memperoleh tingkat penghasilan per tahun yang lebih besar dari tingkat penghasilan per tahun dengan dasar SLTA akan tetapi penghasilan tersebut baru diperoleh mulai tahun keempat sesudah tamat. Misalkan penghasilan seorang sarjana muda tiap tahun t adalah $W(t)$. Maka *net present value*-nya dari arus penghasilannya seumur hidup adalah:

$$Y(sm) = \sum_{t=4}^{40} \frac{W(t)}{(1+r)^t}$$

Teori *Human Capital* mengemukakan bahwa seorang tamatan SLTA akan memutuskan meneruskan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana muda bila pada satu tingkat *discount rate* tertentu, nilai sekarang dari arus penghasilan seumur hidup sarjana muda dikurangi biaya selama sekolah, lebih besar daripada nilai sekarang dari arus penghasilan seumur hidup seseorang dengan tamatan SLTA. Jadi seorang tamatan SLTA akan melanjutkan sekolah untuk menjadi sarjana muda bila : $Y(sm) - B > Y(sla)$. Sebaliknya bila seorang tamatan SLTA akan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah bila untuk satu tingkat *discount rate* tertentu dengan $Y(sm) - B < Y(sla)$. Dalam hal ini B adalah merupakan biaya pendidikan yang dikeluarkan secara langsung, $Y(sla)$ adalah penghasilan yang dikorbankan untuk memperoleh $Y(sm)$ dan oleh sebab itu

dinamakan *opportunity cost* biaya tidak langsung dari sekolah menjadi sarjana muda.

Kemudian *Internal Rate of Return* (IRR) dari melanjutkan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana muda tersebut pada tingkat *discount rate* yang mempersamakan hasil dari melanjutkan pendidikan tersebut dengan biaya total. Biaya total adalah jumlah biaya tidak langsung (*opportunities cost*) dan biaya langsung. Berdasarkan pada persamaan-persamaan diatas tentang *human capital* dapat dirumuskan IRR (*Internal Rate of Return*) dari sarjana muda adalah tingkat *discount* yang membuat :

$$\sum_{t=0}^{40} \frac{V(t)}{(1+r)^t} + \sum_{t=0}^3 \frac{C(t)}{(1+r)^t} = \sum_{t=4}^{40} \frac{W(t)}{(1+r)^t}$$

Dalam hal ini, $V(t)$ adalah tingkat penghasilan seorang tamatan SLTA pada tahun t , $C(t)$ biaya melanjutkan sekolah pada tahun ke- t , dan $W(t)$ adalah tingkat penghasilan seorang sarjana muda pada tahun ke- t . diasumsikan bahwa menjadi sarjana muda memerlukan 4 tahun setelah SLTA, dan berpenghasilan selama 36 tahun, sedangkan tamatan SLTA berpenghasilan selama 40 tahun.

Penggunaan IRR dalam analisa *Human Capital* sangat bermanfaat. Adapun manfaat yang dapat digunakan dari IRR tersebut adalah :

- a. Informasi mengenai IRR privat dapat digunakan seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai apakah melanjutkan sekolah atau tidak.
- b. Perhitungan IRR dapat dipergunakan sebagai alat untuk menerangkan situasi tenaga kerja seperti bertambahnya pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik di suatu wilayah.
- c. Perhitungan IRR dapat dipergunakan untuk memperkirakan tambahan penyediaan tenaga dari masing-masing jenis dan tingkat pendidikan beberapa tahun ke depan.
- d. IRR dapat pula dipergunakan dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja.

2.2.6 Teori Investasi Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi

Schultz (1968:89) mengkaji tentang peranan investasi sumber daya manusia dalam pembangunan di negara berkembang yang membawa bergesernya paradigma investasi dengan memasukkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang dominan dalam proses pembangunan. Tingkat pembangunan suatu bangsa biasanya sangat berkaitan dengan tingkat investasi sumber daya manusianya, baik secara *stock* maupun tingkat akumulasinya (Rachbini, 2001:99), sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu investasi pada bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan (Effendi, 1995:6).

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, memerlukan investasi yang tidak sedikit. Investasi total secara netto yang menyangkut pembinaan sumber – sumber daya produksi masing – masing dan secara bersamaan, bagaimanapun harus bersumber pada tabungan. Selain itu investasi oleh pemerintah ditujukan terutama pada pembentukan modal masyarakat, khususnya mengenai prasarananya (Djojohadikusumo, 1994:132).

Masalah umum dan penting dalam investasi adalah penggunaan modal yang efisien (tepat-guna) dan efektif (daya-guna) sehingga dapat mengembangkan proses akumulasi sumber daya manusia (*human capital formation*) dalam arti menambah jumlah dan kualitas orang-orang yang ahli, berketrampilan, berpendidikan dan berpengalaman pada bidang – bidang yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Investasi ini menjadi suatu investasi pemerintah dalam jangka panjang (Rachbini, 2001:98).

Secara prinsip, akumulasi sumber daya manusia sama dengan proses investasi barang dan jasa walaupun berbeda dalam taraf pendekatan praktisnya. Pendekatan investasi bisa diukur melalui persamaan dasar dalam model Harrod-Domar, yaitu :

$$g = s / k$$

Dalam konteks tersebut, g berarti laju pertumbuhan, s merupakan bagian tabungan sebagai persentase dari pendapatan nasional ($s = S / Y$) dan k adalah nisbah

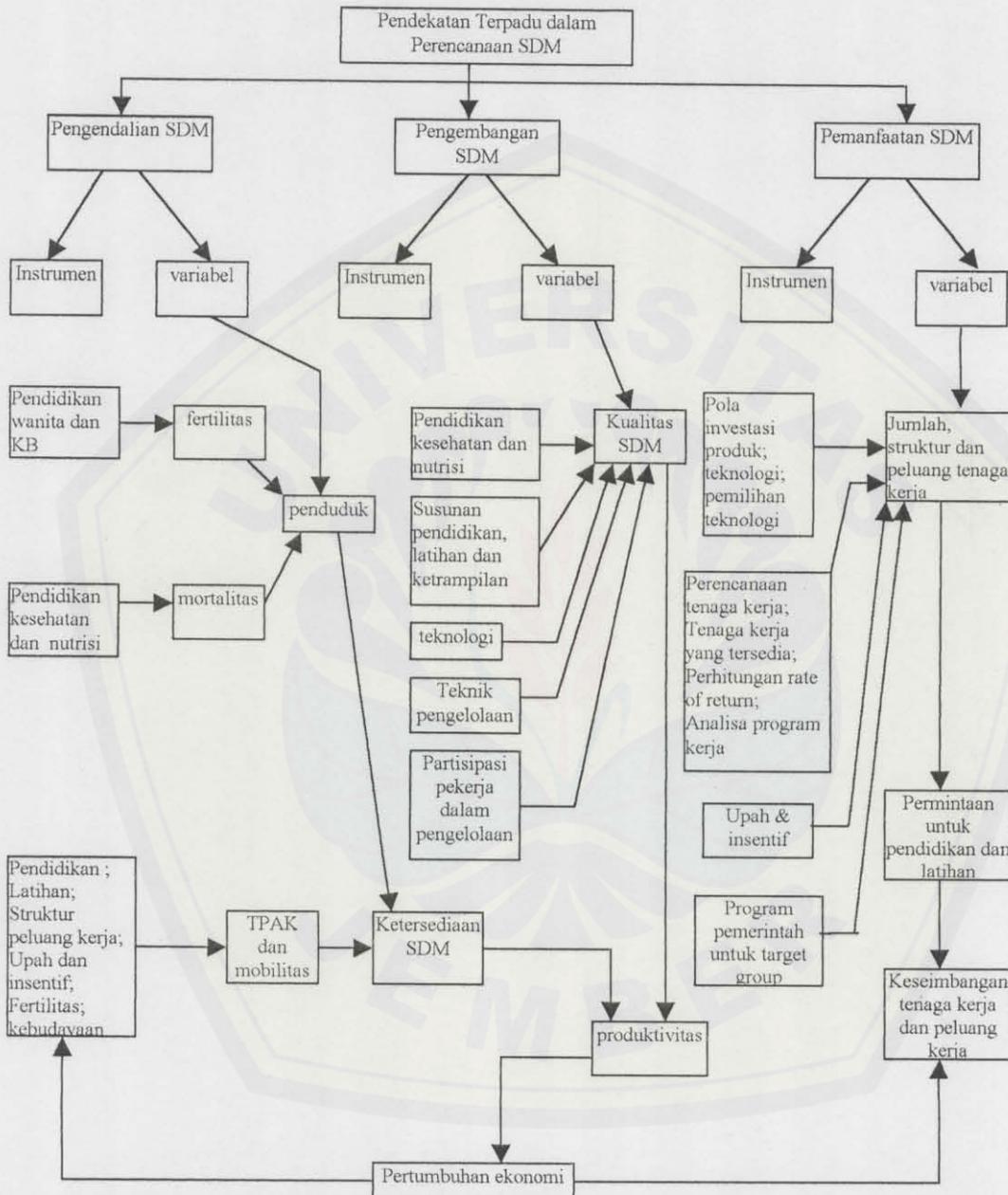
investasi modal terhadap hasil produksi (*capital output ratio*) yang bersifat konstan dan mencerminkan *incremental capital output ratio* (ICOR). ICOR merupakan tolok ukur bagi produktivitas tiap tambahan investasi modal.

2.2.7 Relevansi *Human Development* dan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi dari pembangunan manusia secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Beberapa bukti empiris yang mendukung dampak investasi pada pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut dapat menyebabkan kemajuan – kemajuan dalam bidang sosial, walaupun laju pertumbuhan ekonomi tiap wilayah tidak sama (Thamrajakshi, 1988:3). Alasan dari pernyataan tersebut dikemukakan oleh Effendi (1995:9) bahwa rendahnya produksi dan permintaan masyarakat mungkin disebabkan oleh kekurangan kronis dan ketidakstabilan pembiayaan sektor-sektor sosial.

Wheeler (dalam Effendi,1995:9) menyebutkan bahwa relevansi kebijakan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, nutrisi) dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi di beberapa negara memberikan beberapa pandangan, yaitu: (1)perangkat tingkat equilibrium yang rendah (*low-level equilibrium trap*) hanya muncul di negara-negara yang tidak ada kemajuan dalam pendidikan; (2)di negara-negara miskin, investasi dalam bidang fisik adalah strategi yang baik dibandingkan dengan investasi di bidang sumber daya manusia; (3)tingkat fertilitas untuk semua *cohort* dapat berubah sejalan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi dan dapat dipengaruhi oleh investasi sumber daya manusia.

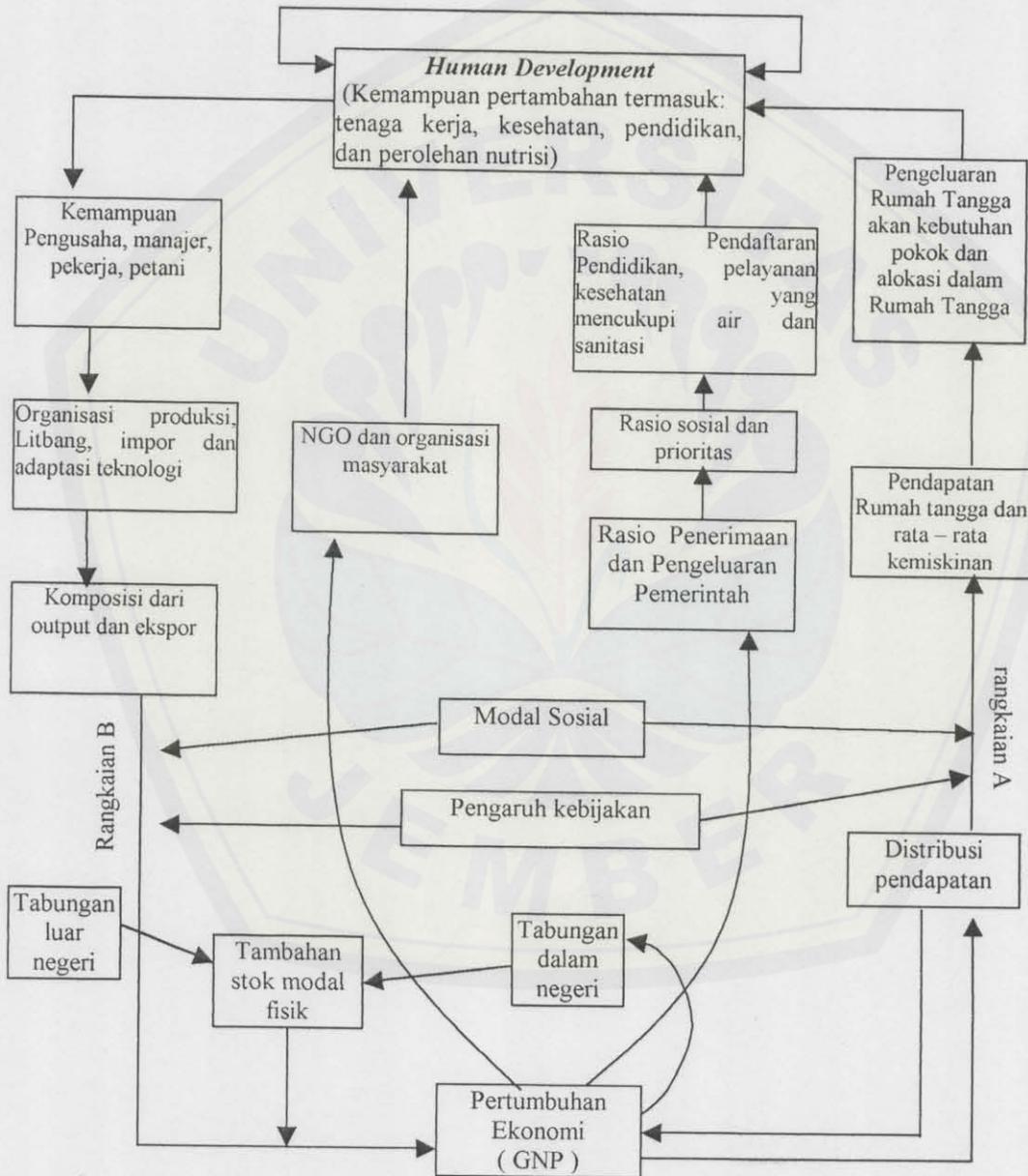
Proses pendekatan terpadu dalam perencanaan sumber daya manusia dikemukakan oleh Thamarajakshi (1988:17) dalam laporan UNDP di India. Perencanaan sumber daya manusia mencakup perencanaan jumlah, modal manusia (*human capital*), pengembangan dan pemanfaatan perencanaan kependudukan, kesehatan masyarakat, penyerapan nutrisi yang baik, pendidikan dan ketenagakerjaan. Proses yang dapat diberikan dari konsep pendekatan terpadu dalam perencanaan sumber daya manusia tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1: pendekatan terpadu perencanaan SDM
 Sumber : Thamarajakshi, 1988:17, diolah

Supply dan demand tenaga kerja yang ekuilibrium ditentukan oleh percepatan dan struktur pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi dan kerangka kebijakan pembangunan. Pendekatan tersebut mencakup proses interaksi antara variabel demografi dan variabel sistem sosio-ekonomi.

Teori lain dikemukakan oleh Ranis dan Stewart (2001:333) yang menjelaskan sebuah konsep tentang hubungan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan pembangunan manusia (*human development*). Secara garis besar konsep hubungan tersebut digambarkan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2 : Siklus HD dan GNP
 Sumber : Ranis dan Stewart, 2001:334

Siklus pembangunan manusia dan pertumbuhan tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua arah yaitu rangkaian A dan rangkaian B. Dalam rangkaian A,

dalam mata rantai menjadi lebih kuat dan bisa dikatakan bersifat *ceteris paribus* tentang pendistribusian pendapatan yang lebih baik, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tingkat pendidikan wanita yang lebih tinggi, kesamaan jender yang baik, rasio pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang tinggi dan fungsi produksi pembangunan manusia yang lebih efisien. Dalam rangkaian B, penekanannya pada tingkat produktivitas manusia dengan distribusi pendapatan yang juga memerankan peranan yang sangat penting terhadap pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Saran yang dikemukakan dalam tiap rantai menurut mereka adalah : (1) dalam rangkaian A disarankan untuk lebih besar mengalokasikan sumber daya terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebijakan yang menimbulkan distribusi pendapatan yang lebih merata, serta memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi pengangguran; (2) saran dalam rangkaian B dapat dilakukan dengan mengambil keuntungan dari peningkatan level pembangunan manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan untuk menambah rasio investasi, kebijaksanaan meningkatkan distribusi pendapatan, serta melalui kebijaksanaan untuk memilih teknologi yang sesuai dan adopsi teknologi.

Di satu sisi, dalam konsep ini pertumbuhan ekonomi mempersiapkan sumber daya yang ada untuk tetap mempertahankan kemajuan pembangunan manusia, dan di lain pihak mempertahankan kemajuan dalam hal mutu modal manusia yang juga memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

III. METODE PENELITIAN



3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif-kualitatif*, dimana seorang peneliti berusaha untuk seseksama mungkin mendeskripsikan gejala – gejala sosial menurut keputusan – keputusan yang sesuai dengan tujuannya (Soeratno dan Arsyad, 1988:48). Dalam hal ini yang diteliti adalah gejala – gejala sosial tentang *Human Development* di Jawa Timur. Selain itu metodologi AHP sendiri merupakan penelitian *deskriptif* seperti yang dikemukakan oleh Saaty (1996:20) bahwa:

“The AHP is a descriptive theory. Therefore, it is not an automatic set-up for accomodating any normative approach suchas utility maximization. It needs to be interpreted and adapted for that purpose.”

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi manusia yang *expert* atau ahli serta dianggap lebih mengerti mengenai *Human Development* atau pembangunan manusia serta pemegang keputusan *stakeholder* terhadap *Human Development Policy* di Kabupaten Jember.

3.1.3 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah *decision maker* (pembuat keputusan) dan orang yang dianggap *expert* (ahli) serta mengetahui lebih banyak permasalahan tentang performasi dan proses *Human Development* di Kabupaten Jember.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

1. data Primer yang diperoleh penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat langsung dan *expert* (ahli) dengan bidang pembangunan manusia khususnya di Kabupaten Jember. Kuesioner tersebut disebarakan kepada beberapa pihak yaitu :
 - 1) pakar atau akademisi dari beberapa Universitas di Kabupaten Jember yang menguasai masalah pembangunan manusia, mereka berasal dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan;
 - 2) pejabat Pemerintah Kabupaten Jember yang menguasai masalah pembangunan manusia di Kabupaten Jember, dalam hal ini adalah Kepala Daerah Kabupaten Jember, Kepala Kantor Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 3) DPRD Kabupaten Jember, dalam hal ini Ketua Dewan, Sekretaris Dewan serta Ketua – ketua Komisi yang terkait dengan pembangunan manusia;
 - 4) *Non-Government Organization* (NGO) yang menaruh perhatian dan berkompeten dalam masalah peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Jember.
2. data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dari koran, jurnal, makalah, buku literatur yang mendukung penelitian, dan *surfing* melalui internet; sehingga diharapkan dengan landasan teori yang kuat akan diperoleh kesimpulan yang berbobot ilmiah.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Alasan Penggunaan *Analytic Hierarchy Process*

Dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan (khususnya pembangunan manusia), setiap *policy maker* dalam hal ini pejabat maupun anggota masyarakat sering dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memunculkan banyak pertimbangan dan alternatif dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan yang kompleks tersebut sulit untuk dipecahkan dengan peralatan analisis yang sederhana, apalagi permasalahan yang banyak dan tidak terstruktur.

Banyaknya pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan muncul dalam proses pengambilan keputusan dengan alternatif yang banyak pula dan bersifat kompleks. Sementara itu, alternatif kebijakan yang harus diambil tidak hanya satu atau dua saja, melainkan meliputi sederetan kebijakan, sehingga sulit untuk menentukan prioritasnya, bahkan terkadang kebijakan yang diambil bila dikaitkan satu sama lainnya menjadi kurang konsisten.

Sebagai gambaran, bila kita menganggap kebijakan A lebih baik daripada kebijakan B, dan kebijakan B lebih baik daripada kebijakan C, maka seharusnya kebijakan kita akan cenderung memilih kebijakan A sebagai alternatif yang terbaik. Dalam kenyataannya, aksioma transitivitas ini sering tidak terpenuhi, karena bisa saja dengan suatu pertimbangan, kita cenderung memilih kebijakan C daripada kebijakan A. Ini mengindikasikan bahwa prinsip konsistensi tidak diterapkan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka inilah, metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan, yaitu sebagai alat untuk memutuskan suatu prioritas kebijakan yang sudah mempertimbangkan berbagai macam kriteria, selain itu keputusan ini memiliki tingkat konsistensi yang terjaga.

3.3.2 Metode *Analytic Hierarchy Process*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan dengan menggunakan peralatan utamanya yaitu sebuah hirarki. Dengan hirarki ini, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah, dikelompokkan dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Jamli dan Joesoef, 1999:17). Data utama dari AHP ini adalah persepsi manusia yang dianggap *expert*. Kriteria dari *expert* disini bukan berarti jenius, pintar atau bergelar doktor maupun profesor, melainkan lebih mengarah pada orang yang lebih mengerti benar permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Metode AHP ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty, seorang guru besar pada Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai tahun 1975.

Selain itu AHP merupakan suatu model yang luwes yang memberikan gagasan – gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing – masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses ini juga memungkinkan orang menguji kepekaan hasilnya terhadap perubahan informasi serta dirancang untuk lebih menampung sifat alamiah manusia ketimbang memaksa kita ke cara berpikir yang mungkin justru berlawanan dengan hati nurani, AHP merupakan proses yang ampuh untuk menanggulangi berbagai persoalan politik dan sosio-ekonomi yang kompleks (Saaty, 1991:23).

AHP juga merupakan suatu teori tentang pengukuran, yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskret maupun yang kontinu. Perbandingan – perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya. AHP banyak ditemukan pada pengambilan keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, prediksi, dan alokasi sumber daya, sehingga AHP dapat disebut sebagai metode yang serba guna dan banyak yang menganggap kontroversial (Mulyono, 1988:2). Dengan demikian, AHP dapat dianggap sebagai suatu model *multiobjective-multicriteria-multifactor decisions* (Harker dan Vargas, 1987:1383).

3.3.3 Aksioma Metode AHP

Menurut Mahi (1991:4), metode AHP memiliki empat aksioma yang harus diketahui untuk sampai pada pemahaman logisnya, yaitu :

1. aksioma *Reciprocity* (resiprokal) yaitu matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) yang terbentuk haruslah bersifat berkebalikan (*reciprocal matrix*) secara nyata contohnya adalah jika A_1 lebih disukai dari

A_2 dengan skala w , maka A_2 lebih disukai dari A_1 dengan skala $\frac{1}{w}$;

2. aksioma *Homogeneity* (homogenitas) yaitu dalam melakukan berbagai perbandingan, konsep ukuran yang diperbandingkan haruslah jelas. Pikiran kita akan sulit dalam melakukan perbandingan dengan ukuran yang kurang jelas, misalnya perbandingan antara kelereng dengan jeruk. Dalam konteks “rasa”, maka tidak tepat jika jeruk kita bandingkan dengan kelereng tetapi dalam konteks “besarnya bentuk” kemungkinan perbandingan di atas lebih relevan untuk dipergunakan;
3. aksioma *Dependence* (ketergantungan) yaitu terdapat keterkaitan antara setiap level hirarki, walaupun dapat terjadi hubungan yang tidak sempurna antar level, sehingga dapat dikatakan AHP memiliki ketergantungan selaras keatas, bukan ke samping;
4. aksioma *Expectation* (ekspektasi) yaitu dalam prosesnya, yang dituntut oleh AHP bukanlah “rasionalitas” melainkan lebih menonjol pada “ekspektasi” dan “persepsi” dari manusia. Penilaian yang irasional dapat diterima dalam kaitan ini asalkan tetap konsisten dan memuaskan dengan diasumsikan secara lengkap. Jika ini tidak dipenuhi, maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau pilihan yang tersedia.

3.3.4 Prinsip Kerja AHP

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada empat prinsip kerja yang harus dipahami, yaitu :

1. *Decomposition*, yaitu proses pemecahan persoalan – persoalan yang utuh menjadi unsur – unsur dalam suatu struktur berjenjang (hirarki) dengan memperhitungkan ketergantungan dari setiap unsur, baik dalam hubungan satu level maupun antar level. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur – unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga diperoleh beberapa level dari persoalan tadi (Mulyono, 1988: 3). Hirarki dikatakan lengkap bila semua elemen dalam suatu hirarki memiliki keterkaitan, dengan semua elemen yang ada pada level hirarki berikutnya. Jika tidak demikian, disebut hirarki tidak lengkap (Mahi, 1991:6).

2. *Comparative Judgement*, adalah membuat penilaian tentang kepentingan atau kesukaan relatif terhadap dua elemen berpasangan (*pairwise*) pada suatu level tertentu dalam kaitannya dengan level di atasnya (Mulyono, 1988:3). Penilaian ini adalah inti dari AHP, sehingga diperoleh prioritas elemen dalam suatu level hirarki. Hasil dari penilaian ini akan lebih mudah diikuti bila disajikan dalam bentuk matriks *pairwise comparison* berikut ini (Jamli dan Joesoef, 1999:20) :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Matriks tersebut adalah matriks perbandingan antar-dua-elemen bersifat resiprokal, yaitu:

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

Dimana i dan j berturut – turut merujuk pada baris dan kolom matriks.

Kemudian misalkan A_1, A_2, \dots, A_n adalah kumpulan elemen sebanyak n , sementara w_1, w_2, \dots, w_n adalah nilai, bobot atau intensitas masing – masing elemen. Perbandingan antar-dua-elemen (*pairwise comparison*) dapat ditunjukkan pada matriks di bawah ini (Jamli dan Joesoef, 1999:21) :

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} A_1 & A_2 & \cdots & A_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \cdots \\ A_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \cdots & w_2/w_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & w_n/w_n \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Matriks tersebut menunjukkan tingkat kepentingan relatif antar-dua-elemen, yang diukur dengan skala ordinal. Pengambilan keputusan diminta menggunakan skala terbatas, yang dimulai dari skala 1 sebagai skala terendah, yaitu sama pentingnya (*equally preferred*) atau indifereh hingga skala

tertinggi yaitu skala 9, yaitu mutlak pentingnya (*extremely preferred*). AHP menganjurkan penggunaan skala ordinal dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Skala AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama</u> pentingnya	A dan B <u>sama</u> pentingnya
3	<u>Sedikit lebih</u> penting	A <u>sedikit lebih</u> penting dari B
5	<u>Agak lebih</u> penting	A <u>agak lebih</u> penting dari B
7	<u>Jauh lebih</u> penting	A <u>jauh lebih</u> penting dari B
9	<u>Mutlak lebih</u> penting	A <u>mutlak lebih</u> penting dari B
2, 4, 6, 8	<u>Nilai antara</u> angka di atas	Jika <u>ragu – ragu</u> menentukan skala, misalkan 6 untuk skala antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, misalkan skala 9; maka B dibanding A adalah $\frac{1}{9}$	Asumsi yang masuk akal

Sumber : Jamli dan Joesoef (1999:21), diolah.

Ada dua pertanyaan yang biasa diajukan dalam menyusun skala kepentingan (Mahi, 1991:6), yaitu : pertama adalah elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin/...) dan kedua adalah berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin/...).

Pemilihan skala 1 sampai 9 didasarkan pada penelitian psikologi, pendapat pemakai AHP, perbandingan skala lain dan kemampuan otak manusia dalam menyuarakan urutan preferensinya (Harker dan Vargas, 1987:1389). Dalam konteks ini, Mahi (1991:6) menjelaskan bahwa responden yang diperlukan adalah mereka yang tergolong *expert* (ahli) dan benar – benar menguasai serta mempunyai pengertian yang menyeluruh terhadap permasalahannya.

3. *Synthesis of Priority* adalah proses penentuan prioritas elemen – elemen dalam suatu level hirarki. Dari setiap matriks *pairwise comparison*, kemudian dicari vektor prioritas (*eigenvector*) dari suatu level hirarki untuk mendapatkan *local*

priority. Karena matrik *pairwise comparison* terdapat pada setiap level, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan *synthesis* diantara *local priority*. Proses sintesis ini dinamakan *priority setting* (Mulyono, 1988:4).

Setelah diperoleh skala perbandingan antar-dua-elemen melalui wawancara, menurut Joesoef (1998) untuk memperoleh vektor prioritas (*eigenvector*) dapat di empuh beberapa cara. Cara yang paling baik dari segi keakuratan adalah :

*)misalkan $n = 4$

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\frac{w_1}{w_1} \times \frac{w_1}{w_2} \times \frac{w_1}{w_3} \times \frac{w_1}{w_4}} &= a \\ \sqrt[4]{\frac{w_2}{w_1} \times \frac{w_2}{w_2} \times \frac{w_2}{w_3} \times \frac{w_2}{w_4}} &= b \\ \sqrt[4]{\frac{w_3}{w_1} \times \frac{w_3}{w_2} \times \frac{w_3}{w_3} \times \frac{w_3}{w_4}} &= c \\ \sqrt[4]{\frac{w_4}{w_1} \times \frac{w_4}{w_2} \times \frac{w_4}{w_3} \times \frac{w_4}{w_4}} &= d \\ \hline & a + b + c + d \end{aligned}$$

Kemudian vektor (a, b, c, d) dinormalkan untuk mengetahui posisi relatif masing – masing elemen :

$$\begin{aligned} \frac{a}{a+b+c+d} &= x_1 \\ \frac{b}{a+b+c+d} &= x_2 \\ \frac{c}{a+b+c+d} &= x_3 \\ \frac{d}{a+b+c+d} &= x_4 \end{aligned}$$

Proses penentuan *eigenvector* dari suatu matriks mensyaratkan suatu matriks yang *irreducible* dan non-negatif, artinya elemen dari matriks tersebut tidak ada yang nol dan bilangan bilangan negatif. Dengan skala 1 sampai 9, syarat ini dapat dipenuhi, karena $\frac{1}{9}$ adalah nilai elemen terkecil dan 9 nilai terbesar (Ramadhan, 1998).

4. *Logical Consistency* dapat dianggap sebagai prinsip rasionalitas dalam AHP. Menurut Joesoef (1998) ada tiga makna yang terkandung dalam konsep konsistensi, yaitu antara lain :

- 1) Obyek–obyek yang serupa / sejenis dikelompokkan sesuai dengan relevansinya. Contohnya, bila ban dan donat dikelompokkan menjadi satu bila kriterianya adalah “lingkaran dengan lobang ditengahnya” dan tidak dapat dikelompokkan jika “rasa” yang menjadi kriterianya.
- 2) Matriks perbandingan bersifat resiprokal, artinya jika A_1 adalah dua kali lebih penting dari A_2 maka A_2 adalah setengah kali lebih penting dari A_1 .
- 3) Hubungan antar-elemen diupayakan bersifat transitif. Contohnya, jika musik jazz dinilai 2 kali lebih menarik dibanding musik rock dan bila musik rock 3 kali lebih menarik dibanding musik pop, maka musik jazz harus dinilai 6 kali lebih menarik dibanding musik pop. Bila tidak demikian kondisinya, maka terjadi intransitivitas. Jadi rasionalitas yang dimaksud dalam AHP tidak sekedar transitivitas. AHP tidak mengharuskan terdapat konsistensi atau transitif sempurna, melainkan mengijinkan tidak berlakunya transitivitas serta memaklumi inkonsistensi manusia karena gejala ini bersifat natural dan tidak dapat dihindari. Konsistensi dalam metode AHP diukur dengan menggunakan *Consistency Ratio* (CR). Mula – mula hitung terlebih dahulu *Consistency Index* (CI) yang menggambarkan deviasi preferensi dari konsistensinya. Rumus *Consistency Index*-nya adalah sebagai berikut :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, sedangkan λ_{\max} adalah *eigenvalue* terbesar. Kemudian hitung CR, yaitu CI dibagi dengan *Random Index* (RI), dengan menggunakan rumus berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Tabel 3.2 Indeks Random

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

Sumber: Jamli dan Joesoef (1999:22), diolah

Indeks Random (RI) adalah indeks konsistensi (CI) matriks resiprokal yang dibentuk secara random. Indeks ini (Tabel 3.2) diperoleh setelah melalui eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15, dengan hipotesis bahwa indeks akan meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

3.3.5 Eigenvector dan Konsistensi

Menurut Joesoef (1998), misalkan ada n batu A_1, A_2, \dots, A_n yang beratnya sudah diketahui, yaitu w_1, w_2, \dots, w_n . matriks perbandingan antar-dua-elemen (*pairwise comparison matrix*) adalah berikut ini :

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} A_1 & A_2 & \dots & A_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{matrix} & \begin{matrix} w_1/w_1 & w_1/w_2 & \dots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & w_2/w_2 & \dots & w_2/w_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \dots & w_n/w_n \end{matrix} \end{matrix}$$

atau

$$A = (w_i / w_j)$$

karena berat batu sudah diketahui, maka $A = (w_i / w_j)$ pasti mempunyai hubungan resiprokal dan konsisten.

Dalam teori matriks dinyatakan bahwa, “jika A adalah matriks bujursangkat dan n adalah angka yang memenuhi $Aw = nw$, untuk vektor kolom $w \neq 0$ (*non-trivial solution*), maka dikatakan bahwa n adalah *eigenvalue* dari matriks

A , dan w yang memenuhi persamaan $Aw = nw$ disebut *eigenvector* yang berhubungan dengan n (Joesoef, 1998). Sehingga matriks $A = (w_i/w_j)$ dapat diubah menjadi :

$$\begin{bmatrix} w_1/w_1 & w_1/w_1 & \cdots & w_1/w_1 \\ w_1/w_1 & w_1/w_1 & \cdots & w_1/w_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ w_1/w_1 & w_1/w_1 & \cdots & w_1/w_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_1 \\ \cdots \\ w_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_1 \\ \cdots \\ w_1 \end{bmatrix}$$

Perkalian A dengan w menghasilkan nw . vektor $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ yang memenuhi persamaan $Aw = nw$ disebut vektor prioritas (*eigenvector*). Mudah dibuktikan bahwa dalam matriks $A = (w_i/w_j)$ semua *eigenvector* adalah nol kecuali satu, yaitu n . jadi, n adalah *eigenvector* terbesar yang sama dengan jumlah elemen diagonal matriks. Untuk menemukan ranking atau solusi yang *unique*, *eigenvector* ini dinormalisasi sehingga $w_1 + w_2 + \dots + w_n = 1$ (Joesoef, 1998).

Kemudian Joesoef (1998) menyebutkan jika simbol a_{ij} menunjukkan perbandingan berat batu satu dengan setiap berat batu yang lainnya dan perbandingan antar-dua-batu itu dilakukan hanya dengan dua tangan (*subjective judgement*), maka matriks perbandingan antar-dua-batu adalah :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

atau

$$A = (a_{ij})$$

sifat resiprokal matriks ini dinyatakan dengan :

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

dimana i dan j berturut – turut adalah baris dan kolom matriks.

Jika estimasi yang diperoleh adalah $A = (a_{ij})$, sama persis dengan perbandingan antar-dua-batu aktual, $A = (w_i/w_j)$, maka :

Mengingat dua fakta ini, menurut Joesof (1998) jelas bahwa perubahan kecil pada a_{ij} akan memengaruhi $a_{ij} = (w_i/w_j)$ untuk $i, j = 1, 2, \dots, n$ atau

$$a_{ij} \cdot (w_j/w_i) \text{ untuk } i, j = 1, 2, \dots, n$$

sehingga konsekuensinya :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j \cdot \frac{1}{w_i} = n$$

untuk $i = 1, 2, \dots, n$

sehingga :

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot w_j = n \cdot w_i$$

yang ekuivalen dengan :

$$A \cdot w = n \cdot w$$

Selama a_{ij} tersebut diperoleh melalui estimasi, bisa jadi a_{ij} menyimpang dari w_i/w_j , sehingga $Aw = nw$ tidak terpenuhi lagi. Ada dua poin penting sehubungan dengan hal ini. Pertama, jika $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah *eigenvalue* matriks $A = (a_{ij})$, yang memenuhi persamaan:

$$Ax = \lambda x$$

dan jika $a_{ij} = 1$ (berarti ia sangat konsisten) untuk semua i , maka pasti :

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = n$$

Dengan kata lain, jika $Aw = nw$ terpenuhi, semua *eigenvalue* sama dengan nol, kecuali *eigenvalue* yang satu, yaitu sebesar n . ini berarti dalam kasus matriks konsisten ($a_{ij} = 1$), n adalah *eigenvalue* terbesar. Kedua, jika ada sedikit perubahan

dan berurutan, yaitu : identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level-level dan elemen-elemen dalam suatu level, kemudian setiap elemen tersebut diidentifikasi dan dipakai dalam formulasi pertanyaan.

Pada tahapan evaluasi hirarki ada dua hal yang dilakukan, yaitu penilaian dan sintesa hasil. Penilaian berarti pengambilan keputusan melalui penterjemahan semua informasi yang tersedia dan persepsinya untuk membandingkan sepasang elemen. Persepsi atau penilaian tersebut dinyatakan dalam skala 1 sampai 9 dan hasil ini nantinya akan membentuk sebuah matriks *pairwise comparison*. Setelah matriks terisi semua maka prioritas dari setiap elemen dalam satu level dicari dengan cara mencari *eigenvector*-nya, proses ini disebut *local priority*. Langkah berikutnya adalah melakukan sintesa prioritas, dengan cara mengalikan *local priorities* dengan prioritas elemen pada level di atasnya. Matriks ini akan menghasilkan suatu *global priority* yang menyatakan prioritas masing-masing elemen pada level terakhir dengan syarat sudah memperhatikan pengaruh elemen pada level sebelumnya.

Model AHP tidak mensyaratkan konsistensi yang ketat, tetapi pada bagian akhir tetap diperiksa kembali apakah inkonsistensi pada *local priority*, maka *global priority* masih dapat dijamin konsistensi atau inkonsistensinya minimal. Akan tetapi, diusahakan agar *global priority*-nya mempunyai inkonsistensi yang rendah.

Pada dasarnya tidak ada pedoman umum untuk membuat suatu hirarki, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan seseorang. Namun paling tidak, hirarki tersebut harus cukup kompleks untuk menangkap suasana, tetapi cukup sedikit agar sensitif terhadap perubahan – perubahan (Mulyono, 1988:8).

Ada dua macam hirarki menurut Saaty (1991:30), yaitu hirarki struktural dan hirarki fungsional. Hirarki struktural adalah sistem kompleks yang disusun ke dalam komponen-komponen pokoknya dalam urutan menurun menurut sifat struktural mereka; misalnya: ukuran, warna, umur, atau bentuk. Jadi hirarki struktural dari alam semesta akan menurun dari galaksi ke konstelasi, ke sistem solar, ke planet dan seterusnya, menurun ke atom, inti, proton dan netron. Hirarki

struktural sangat erat kaitannya dengan cara otak kita menganalisis hal yang kompleks, yaitu dengan memecah-mecah obyek yang ditangkap oleh indera menjadi sejumlah gugusan, subgugusan dan gugusan yang lebih kecil lagi.

Sebaliknya, hirarki fungsional ditempuh dengan menguraikan sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokoknya menurut hubungan esensial mereka. Suatu konflik tentang bis sekolah untuk mencapai keterpaduan dapat disusun dalam beberapa kelompok. Misalnya, kelompok pihak berkepentingan (pendidikan bagi anak, mempertahankan kekuasaan, dan semacamnya) dan berbagai alternatif hasil (memakai bis seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali). Hirarki fungsional seperti ini sangat membantu untuk membawa sistem ke arah tujuan yang diinginkan, misalnya pemecahan konflik, prestasi yang efisien atau kebahagiaan menyeluruh (Nugraha, 2000:39).

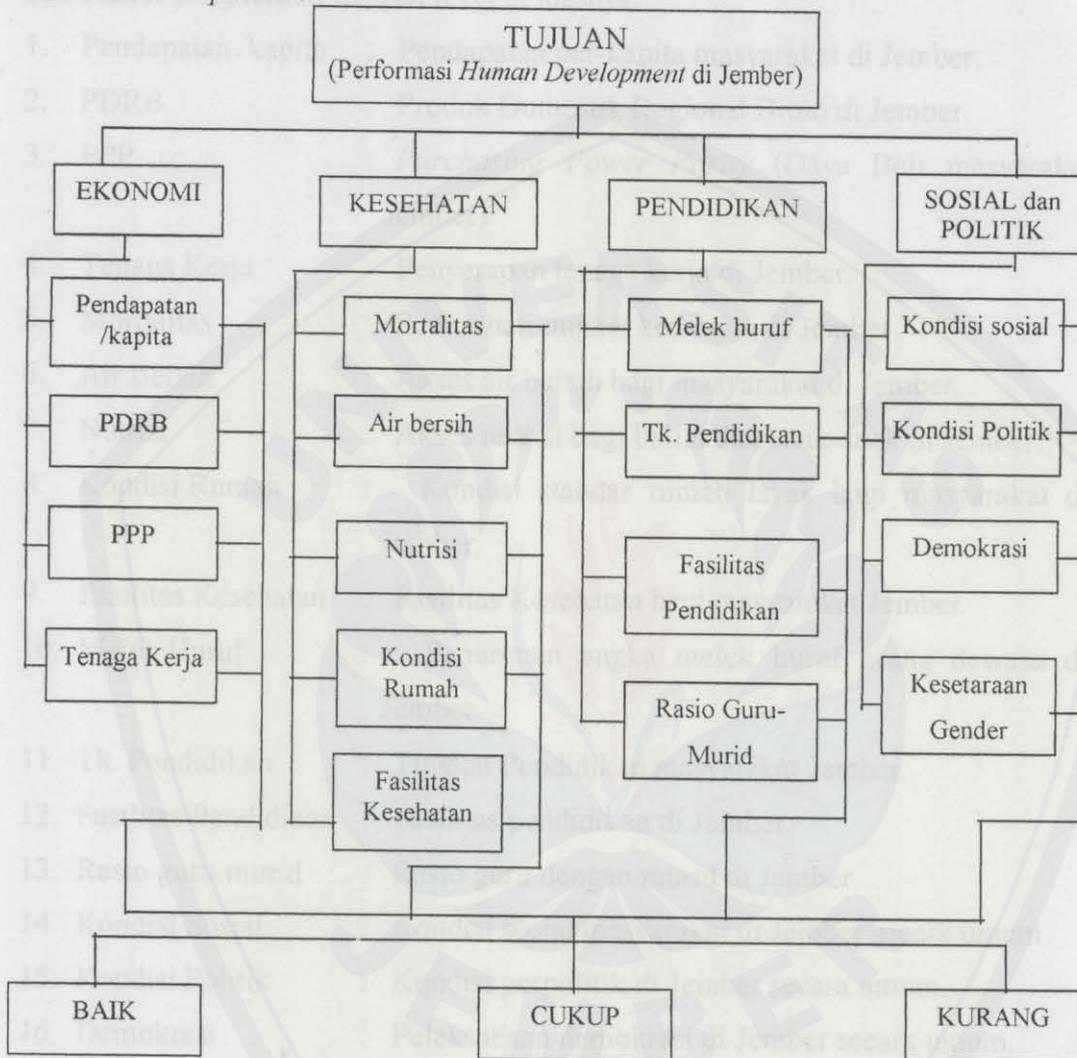
Hirarki fungsional sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hirarki lengkap dan tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu level memiliki keterkaitan dengan elemen pada level berikutnya, sedangkan pada hirarki tidak lengkap tidak semua elemen pada suatu level memiliki keterkaitan dengan level berikutnya (Mahi, 1991:6).

Dalam menentukan dan menjabarkan hirarki, Priatmono (2000:6) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Pada saat penjabaran tujuan ke dalam sub-tujuan dibawahnya, harus diperhatikan apakah setiap aspek dari tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam sub-tujuan tersebut;
2. meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu dihindari terjadinya pembagian sub-tujuan yang terlampau banyak (secara horisontal maupun vertikal);
3. sebelum menetapkan tujuan untuk menjabarkan hirarki tujuan yang lebih rendah, maka dilakukan tes kepentingan "Apakah suatu tindakan hasil yang terbaik akan diperoleh bila tujuan tersebut tidak dilihat dalam proses evaluasi?"

Berdasarkan data yang didapat dan gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti, maka proses hirarki dapat disusun dengan baik. Dari beberapa data, gambaran umum dan kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Jember,

penulis menggunakan hirarki tidak lengkap seperti yang terlihat dalam gambar 3 berikut ini untuk mengidentifikasi performasi yang dicapai dalam *Human Development* :



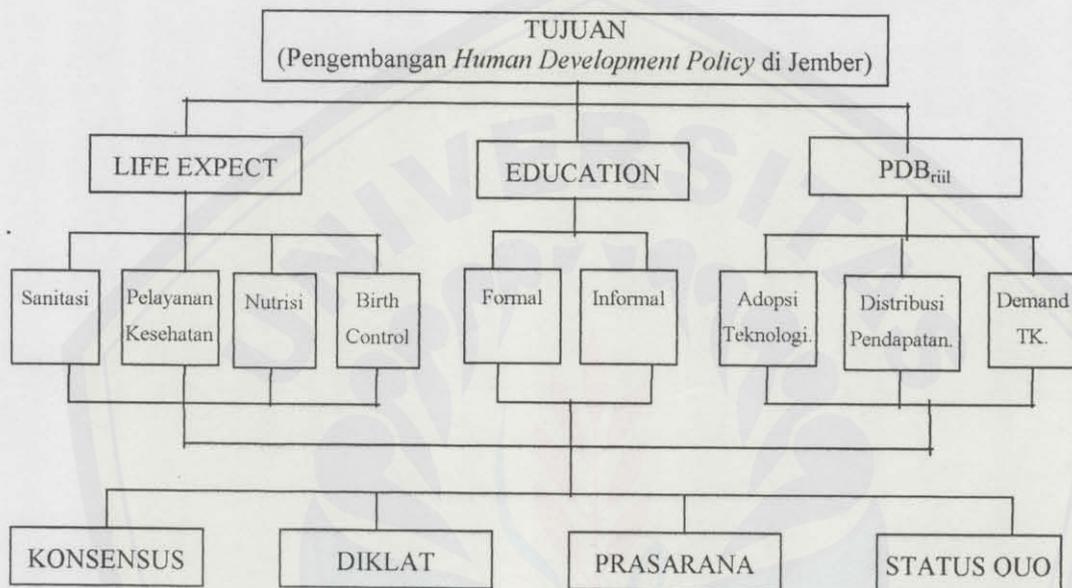
Gambar 3: Performasi *Human Development* di Kabupaten Jember.
 Sumber : Canny (2000), diolah.

Hirarki Level/Tingkat 1 :

Bidang-bidang yang terkait dengan performasi *Human Development* di Kabupaten Jember.

1. EKONOMI
2. KESEHATAN
3. PENDIDIKAN

Kemudian setelah diketahui performasinya, penelitian ini mencoba mencari alternatif-alternatif dari kebijakan pembangunan yang mendukung tercipta tingginya *Human Development* di Kabupaten Jember. Adapun hirarki yang dianggap mewakili tujuan tersebut ditampilkan dalam diagram pada gambar 4 berikut :



Gambar 4: Pengembangan *Human Development Policy* di Kabupaten Jember.
Sumber : Azis (1992), diolah.

Keterangan diagram:

Hirarki Level 1 :

Indikator pembangunan manusia :

1. LIFE EXPECT : Usia harapan hidup manusia.
2. EDUCT : tingkat pendidikan terakhir rata-rata penduduk dewasa.
3. PDB_{riil} : tingkat pendapatan riil per-kapita.

Hirarki Level 2 :

Faktor – faktor yang mempengaruhi indikator pembangunan manusia :

- Sanitasi : akses terjangkaunya terhadap sanitasi.
- Pelayanan Kesehatan : akses terjangkaunya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

- Nutrisi : akses terjangkaunya nutrisi bagi balita dan anak-anak.
- Birth Control : pengaturan kelahiran yang terencana dalam keluarga
- Formal : pendidikan formal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- Informal : pendidikan informal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- Adopsi Teknologi : kemampuan masyarakat mengadopsi teknologi .
- Distribusi Pendapatan : pemerataan pendapatan dalam sistem pasar .
- Demand TK. : permintaan tenaga kerja dalam sistem pasar (penciptaan lapangan kerja baru)

Hirarki Level 3:

Alternatif program kebijakan pembangunan yang dianggap penting bagi pengembangan pembangunan manusia di Jawa Timur:

- KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

3.4.2 Pengisian Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada responden yang tergolong *expert* atau mereka yang memiliki pengertian menyeluruh terhadap permasalahan yang akan dikaji. Kuesioner ini dapat diisi secara individu maupun kelompok. Secara kelompok maksudnya adalah seluruh responden bertemu dan melakukan diskusi sehingga



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 Km² atau 329.333,4 Ha. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi 6°27'9" s/d 7°14'33" Bujur Timur dan 7°59'6" s/d 8°33'56" Lintang Selatan. Bagian tengah dari wilayah Kabupaten Jember dikaruniai oleh dataran ngarai yang subur sampai pada daerah selatan yang dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta Samudra Indonesia yang luas dengan berbatas Pulau Nusa Barong. Batas-batas administrasi Kabupaten Jember adalah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang; sedangkan bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Jember sendiri secara administratif terbagi menjadi 31 Kecamatan, 240 Desa dengan 86 desa pada kondisi swasembada II dan 154 desa pada kondisi swasembada III (data tahun 2000). Kabupaten Jember terkenal dengan sebagai daerah lumbung padi sehingga membentuk karakteristik sebagai daerah agraris. Hal tersebutlah yang juga menciptakan pola mata pencaharian penduduk yang lebih besar pada sektor pertanian. Berikut ini adalah tabulasi mata pencaharian penduduk Kabupaten Jember berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja

Jenis Kelamin	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa-jasa	Lain-lain
Laki-laki	332.163	35.262	104.925	32.454	120.912
Perempuan	119.772	47.121	84.246	27.258	7.794

Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2000.

Luas areal perkebunan yang dimiliki Kabupaten Jember mencapai 78.590,74 Ha dengan berbagai komoditi yang berorientasi pada ekspor, seperti kakao, kopi, karet, tembakau, the, kelapa, cengkeh, pinang dan laing-lain, sedangkan kawasan hutannya secara efektif mempunyai areal seluas 77.081,7 Ha yang menurut

fungsinya terbagi atas: hutan produksi (28.708,4Ha); hutan lindung (48.301,9Ha) dan hutan cagar alam (71,4Ha).

Jumlah penduduk Kabupaten Jember sampai pada tahun 2000 secara total sebanyak 2.162.688 jiwa dengan 1.062.309 laki-laki dan 1.100.379 perempuan. Jumlah penduduk tersebut memiliki kepadatan 852 jiwa/KM. Sedangkan jumlah keluarga secara total di Kabupaten Jember adalah sebesar 616.160 yang dibagi menurut tingkat kesejahteraannya menjadi 5 bagian yaitu: Keluarga Prasejahtera sebesar 135.835 keluarga; Keluarga Sejahtera I sebesar 161.806 keluarga; Keluarga Sejahtera II sebesar 150.098 keluarga; Keluarga Sejahtera III sebesar 121.264; dan Keluarga Sejahtera III⁺ sebanyak 47.157 keluarga. Pada laporan *Indonesia Human Development Report 2001* (IHDR 2001) disebutkan bahwa sampai pada tahun 1999 (berdasarkan Sensus Penduduk) angka harapan hidup manusia di Jember adalah 57,9 tahun untuk laki-laki dan 61,5 tahun bagi perempuan. Rata-rata partisipasi ketenaga kerjaan di Kabupaten Jember mencapai 66,1% dari angkatan kerja yang ada. Sedangkan pengangguran terbuka di Kabupaten Jember mencapai 3,2%. Angkatan kerja yang sedang bekerja di bawah 14 jam per minggu sebesar 18,9% sedangkan yang kurang dari 35 jam per minggu adalah sebesar 56,4%. Pekerja di sektor informal mencapai 46,6% dari total angkatan kerja yang ada. Pengeluaran perkapita secara kasar di Kabupaten Jember setiap bulannya adalah sebesar 95.800 Rupiah per bulan dengan 69,7%-nya untuk mengkonsumsi pangan. Garis kemiskinan yang ditetapkan di Kabupaten Jember adalah pendapatan sebesar 77.900 Rupiah per kapita per bulan sehingga menciptakan 987.300 jiwa dibawah garis kemiskinan atau dengan rata-rata sebesar 46,1% dari jumlah penduduk yang ada.

Kondisi pendidikan masyarakat di Kabupaten Jember berdasarkan IHDR 2001 disebutkan bahwa rata-rata partisipasi masyarakat dalam sekolah adalah 88,5% pada usia 7-12 tahun; 57,5% pada usia 13-15 tahun; 31,3% pada usia 16-18 tahun; dan 4,9% pada usia 19-24 tahun. Sedangkan rata-rata tingkat *drop out* adalah 7,9% pada usia 7-15 tahun; 18,2% pada usia 16-18; serta 26,5% pada usia 19-24 tahun. Jumlah sekolah SLTP negeri yang ada di kabupaten Jember adalah 59 sekolah dengan guru sebanyak 1.753 orang dan murid 33.576 orang.

Sedangkan untuk SLTP swasta terdapat 77 sekolah dengan guru sebanyak 1.232 orang dan murid 12.672 orang. Sekolah SLTA negeri di Jember sebanyak 16 sekolah dengan guru sebanyak 624 orang dan murid sebanyak 3.730 orang. Sedangkan untuk SLTA swasta sebanyak 30 sekolah dengan guru sebanyak 598 orang dan murid 7.169 orang. Pendidikan bagi para petani di Kabupaten Jember dilaksanakan melalui Kelompencapir yang terbagi menjadi 15 kelompok dengan anggota 450 orang.

Fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Jember adalah Rumah sakit sebanyak 6 unit, Puskesmas sebanyak 50 dan Puskesmas keliling sebanyak 41 unit. Untuk Posyandu di Kabupaten Jember terdapat 2.666 tempat dengan pengunjung kurang lebih sebanyak 146.446 pengunjung. Untuk tenaga kesehatan yang dimiliki Kabupaten Jember adalah 121 dokter, 204 perawat, 247 bidan, paramedis lain sebanyak 16 orang dan 41 tenaga teknis serta 127 dukun. Bayi yang mendapatkan imunisasi menurut jenisnya adalah 38.578 bayi untuk imunisasi DPT-1, 38.299 bayi untuk imunisasi BCG, 33.632 untuk imunisasi Polio-4, dan 35.832 bayi untuk imunisasi Campak. Dari sisi Keluarga Berencana di Kabupaten Jember terdapat 455.871 Pasangan Usia Subur dengan peserta KB aktif mencapai 322.210 (70,68%). Banyaknya tenaga petugas KB di Kabupaten Jember sendiri adalah 31 orang pengawas PLKB, 31 orang staff PLKB, 171 orang PLKB, 245 PPKBD, dan 1.971 SubPPKBD.

Pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Jember pada tahun 1998 sebesar – 7,58% yang merupakan pertumbuhan ekonomi riil terendah selama beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2000 PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Jember adalah sebesar 5.139.520,56 sedangkan PDRB atas harga konstan adalah sebesar 2.208.057,36. Penerimaan yang paling besar adalah dari sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 50,3%; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,7%; jasa-jasa sebesar 8,5%; industri sebesar 7,5%; keuangan dan persewaan sebesar 5,5%; pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,1%; listrik, gas dan air bersih sebesar 0,9%.

4.2 Analisa Data

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

Aplikasi model *Analytic Hierarchy Process* ini sedikit berbeda dengan metode penelitian survai pada umumnya. Proses adopsi pendapat dari responden dalam AHP tidak mensyaratkan jumlah minimum tertentu dari responden untuk mewakili suatu persepsi terhadap permasalahan, tetapi AHP hanya mensyaratkan responden-responden yang berkompoten serta memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat dan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Berdasarkan identifikasi masalah dan responden yang terkait dengan masalah performasi dan kebijakan *Human Development* di Kabupaten Jember, maka input data yang diambil dapat diklasifikasikan terdiri dari dua bagian yaitu bagian performasi dan kebijakan *Human Development*-nya. Kuesioner yang disebarakan berjumlah total 25 buah tetapi karena keterbatasan tenaga dan waktu maka yang berhasil dikumpulkan kembali berjumlah 14 buah untuk performasi dan 7 buah untuk *Human Development policy*. Untuk bagian performasi selain input data dari pihak pemerintah Kabupaten Jember, responden juga ada yang berasal dari kalangan DPRD Kabupaten Jember, akademisi dan juga dari NGO (*Non Government Organization*) sebagai pihak yang bersifat oposan dan netral dalam mengukur performasi *Human Development* di Jember. Sedangkan untuk input data pada bagian kebijakan pemerintah tentang *Human Development* berasal dari pihak pemerintah dan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jember.

Input data dari pihak pemerintah diwakili oleh Kantor Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Jember, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jember, Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Jember, Kantor Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jember dan Kantor Kependudukan Kabupaten Jember. Input data dari pihak DPRD diwakili oleh Sekretaris Dewan dan Komisi A. Input data dari pihak universitas berasal dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Input dari pihak NGO berasal dari Solidaritas Pemuda Jember, Tiyang Alit dan SD Inpres.

4.2.2 Hasil Penghitungan Data

4.2.2.1 Penghitungan Performasi *Human Development* di Kabupaten Jember

Berdasarkan landasan teori dan pemetaan kondisi serta permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Jember maka telah disajikan pemecahan kompleksitas permasalahan melalui hirarki performasi *Human Development* di Kabupaten Jember. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data kualitatif yang dikuantifisir. Data yang diperoleh kemudian dijadikan matriks *Pairwise Comparison* untuk setiap kelompok responden. Demi alasan kecepatan dan ketepatan maka dipergunakan program *software Expert Choice* dalam mengolah matriks. Hasil sintesa dari tiap responden direkap yang nantinya dirata-rata secara geometris untuk mengetahui prioritas global dari tiap kriteria dan alternatif yang ingin dicari. Berikut ini rekapitulasi kuesioner dari responden terhadap performasi *Human Development* di kabupaten Jember :

Tabel 4.2: Rekap hasil kuesioner Performasi *Human development* di Jember

Perbandingan		Elemen Pembanding lebih penting	%	Sama penting	%	Elemen yg Dibandingkan lebih penting	%
Elemen pembanding	Elemen yg dibandingkan						
kriteria Y/kapita							
baik	cukup	1	7	8	57	5	36
baik	kurang	5	36	8	57	1	7
cukup	kurang	10	71	4	29	0	0
PDRB							
baik	cukup	2	14	10	71	2	14
baik	kurang	8	57	6	43	0	0
cukup	kurang	9	64	5	36	0	0
PPP							
baik	cukup	1	7	11	79	2	14
baik	kurang	8	57	6	43	0	0
cukup	kurang	7	50	7	50	0	0
Tenaga kerja							
baik	cukup	1	7	11	79	2	14
baik	kurang	8	57	4	29	2	14
cukup	kurang	9	64	5	36	0	0
mortalitas							
baik	cukup	7	50	7	50	0	0
baik	kurang	7	50	7	50	0	0
cukup	kurang	1	7	13	93	0	0
air bersih							
baik	cukup	0	0	7	50	7	50

baik	kurang	3	21	11	79	0	0
cukup	kurang	10	71	4	29	0	0
Nutrisi							
baik	cukup	0	0	2	14	12	86
baik	kurang	7	50	6	43	1	7
cukup	kurang	12	86	2	14	0	0
Kondisi rumah							
baik	cukup	1	7	12	86	1	7
baik	kurang	9	64	5	36	0	0
cukup	kurang	14	100	0	0	0	0
fasilitas kesehatan							
baik	cukup	0	0	8	57	6	43
baik	kurang	9	64	4	29	1	7
cukup	kurang	9	64	5	36	0	0
melek huruf							
baik	cukup	0	0	10	71	4	29
baik	kurang	8	57	6	43	0	0
cukup	kurang	9	64	5	36	0	0
tingkat pendidikan							
baik	cukup	0	0	11	79	3	21
baik	kurang	5	36	9	64	0	0
cukup	kurang	8	57	6	43	0	0
fasilitas pendidikan							
baik	cukup	0	0	1	7	13	93
baik	kurang	1	7	8	57	5	36
Cukup	kurang	8	57	6	43	0	0
Rasio Guru-murid							
baik	cukup	0	0	12	86	2	14
baik	kurang	3	21	4	29	7	50
Cukup	kurang	4	29	5	36	5	36
Kondisi sosial							
baik	cukup	0	0	13	93	1	7
baik	kurang	7	50	7	50	0	0
cukup	kurang	7	50	7	50	0	0
kondisi politik							
baik	cukup	0	0	13	93	1	7
baik	kurang	14	100	0	0	0	0
cukup	kurang	13	93	1	7	0	0
demokrasi							
baik	cukup	0	0	13	93	1	7
baik	kurang	10	71	4	29	0	0
cukup	kurang	10	71	4	29	0	0
kesetaraan gender							
baik	cukup	0	0	13	93	1	7
baik	kurang	12	86	2	14	0	0
cukup	kurang	14	100	0	0	0	0

Sumber : kuesioner penelitian.

Pembobotan nilai dari masing-masing responden (lihat lampiran 2) yang dihitung dengan bantuan *Expert Choice*, kemudian setelah itu dari total pendapat responden tersebut dirata-rata secara geometri dari tiap sub-kriterianya. Proses selanjutnya adalah menjumlahkan per sub-kriteria berdasarkan kriteria masing-masing yang kemudian dibagi dengan jumlah elemen sub-kriteria masing-masing.

Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3: Performasi Sub-Kriteria *Human Development* di Jember

KRITERIA	SUB KRITERIA	Rata-rata Geometri		
		Baik	Cukup	Kurang
EKONOMI				
	Pendapatan perkapita	0.33	0.46	0.20
	PDRB	0.37	0.39	0.21
	Daya beli masyarakat	0.36	0.39	0.23
	penyerapan tenaga kerja	0.34	0.42	0.23
	rata-rata performasi EKONOMI	0.35	0.42	0.22
KESEHATAN				
	Penurunan Mortalitas	0.43	0.30	0.26
	Penyediaan Air bersih	0.29	0.47	0.22
	Akses nutrisi	0.28	0.51	0.20
	kondisi rumah	0.36	0.44	0.19
	fasilitas kesehatan	0.31	0.46	0.29
	rata-rata performasi KESEHATAN	0.33	0.44	0.23
PENDIDIKAN				
	Melek huruf dewasa	0.33	0.46	0.21
	Tingkat pendidikan	0.32	0.46	0.21
	Fasilitas pendidikan	0.25	0.43	0.32
	Rasio Guru-murid	0.28	0.34	0.36
	rata-rata performasi PENDIDIKAN	0.29	0.42	0.28
SOSIAL POLITIK				
	Kondisi sosial	0.38	0.37	0.25
	kondisi politik	0.40	0.42	0.18
	Pelaksanaan Demokrasi	0.41	0.39	0.19
	Kesetaraan Gender	0.36	0.46	0.18
	rata-rata performasi SOSIAL POLITIK	0.39	0.41	0.20

Sumber : Lampiran 2.

Kemudian hasil tersebut disintesis dengan cara merata-rata sesuai jumlah kriteria yang ada sehingga diketahui hasil sintesa terhadap tujuan (*goal*) yang ingin diketahui (performasi *Human Development* Kabupaten Jember). Hasilnya adalah :

Tabel 4.4: Performasi kriteria *Human development* di Kabupaten Jember

KRITERIA	PERFORMASI		
	BAIK	CUKUP	KURANG
EKONOMI	0.35	0.42	0.22
KESEHATAN	0.33	0.44	0.23
PENDIDIKAN	0.29	0.42	0.28
SOSIAL POLITIK	0.39	0.41	0.20
Hasil	0,34	0.42	0.23

Sumber : tabel 4.3, diolah.

Berdasarkan pada uraian tabel 4.3 di atas, maka dapat diketahui secara global bahwa performasi *Human Development* telah cukup baik namun masih perlu pengembangan lebih lanjut lagi terutama bagi sub-kriteria yang performasinya masih kurang baik seperti Rasio Guru dan murid serta penyediaan fasilitas pendidikan. Hal inilah yang apabila dilihat melalui data pada *Indonesia Human Development Index* (IHDR) tahun 2001 jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya menjadi penyebab masih rendahnya nilai *Human Development Index* (UNDP:2001) pada di Kabupaten Jember dibanding Kabupaten lain di Jawa Timur yang memiliki karakteristik sejenis (lihat lampiran1). Sesuai dengan teori *Human Capital*, bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga sepatasnya pemerintah menaruh perhatian yang lebih terhadap tingkat pendidikan masyarakatnya agar aspek pembangunan manusia dapat menjadi suatu proses pengembangan dan pendewasaan masyarakat dalam menghadapi proses pembangunan dan globalisasi yang harus dihadapi bersama.

4.2.2.2 Penghitungan *Human Development Policy* di Kabupaten Jember

Dengan kondisi *Human Development* yang ada serta dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jember maka disusun sebuah hirarki yang memilah aspek-aspek dalam penentuan kebijakan pembangunan manusia yang tepat secara prioritas. Berdasarkan kepentingannya, maka responden dari kebijakan *Human Development* ini berasal dari para *stakeholder* yang memiliki pengaruh dalam memutuskan kebijakan tentang pembangunan manusia di Kabupaten Jember yaitu pihak pemerintah dan wakil rakyat di

DPDRD Kabupaten Jember. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data kualitatif yang dikuantifisir. Kuesioner yang diperoleh dijadikan matriks *Pairwise Comparison* untuk setiap kelompok responden. Demi alasan kecepatan dan ketepatan maka dipergunakan program *software Expert Choice* dalam mengolah matriks. Hasil sintesa dari tiap responden direkap yang nantinya dirata-rata secara geometris untuk mengetahui prioritas global dari tiap kriteria dan alternatif yang ingin dicari. Berikut ini rekapitulasi kuesioner dari responden terhadap *Human Development Policy* di kabupaten Jember :

Tabel 4.5: Rekapitulasi pendapat *stakeholder* terhadap tujuan

Perbandingan		Elemen pembanding lebih penting	(%)	sama penting	(%)	Elemen yg dibandingkan lebih penting	(%)
Elemen pembanding	Elemen yang dibandingkan						
<i>Life Expectancy</i>	<i>Education</i>	0	0	0	0	7	100
<i>Life Expectancy</i>	PDB riil	0	0	0	0	7	100
<i>Education</i>	PDB riil	4	57	3	43	0	0

Sumber : Kuesioner penelitian.

Tabel 4.6: Rekapitulasi kuesioner *stakeholder* terhadap kriteria

Perbandingan		Elemen pembanding lebih penting	(%)	Sama penting	(%)	Elemen yg dibanding lebih penting	(%)
Elemen Pembanding	Elemen yg Dibandingkan						
<i>Life Expectancy</i>							
Sanitasi	Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	7	100
Sanitasi	Nutrisi	0	0	1	14	6	86
Sanitasi	Birth Control	4	57	2	29	1	14
Pelayanan Kesehatan	Nutrisi	3	43	4	57	0	0
Pelayanan Kesehatan	Birth Control	7	100	0	0	0	0
Nutrisi	Birth Control	5	71	2	29	0	0
<i>Education</i>							
Formal	Informal	1	14	2	29	4	57
PDB riil							
Adopsi teknologi	Distribusi Pendapatan	1	14	2	29	4	57
Adopsi teknologi	Permintaan tenaga kerja	2	29	0	0	5	71
Distribusi Pendapatan	Permintaan tenaga kerja	4	57	2	29	1	14

Sumber : kuesioner penelitian.

Tabel 4.7: Rekapitulasi pendapat *stakeholder* terhadap sub-kriteria pada kriteria *Life Expectancy*

Perbandingan							
Elemen pembanding	Elemen yg dibandingkan	Elemen pembanding lebih penting	(%)	Sama penting	(%)	Elemen yg dibandingkan lebih penting	(%)
Sanitasi							
Konsensus	Diklat	4	57	2	29	1	14
Konsensus	Prasarana Fisik	0	0	0	0	7	100
Konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	0	0	0	0	7	100
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan							
konsensus	Diklat	0	0	0	0	7	100
konsensus	Prasarana Fisik	0	0	0	0	7	100
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	0	0	3	43	4	57
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
akses nutrisi							
konsensus	Diklat	6	86	1	14	0	0
konsensus	Prasarana Fisik	4	57	3	43	0	0
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	3	43	4	57	0	0
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Pengontrolan kelahiran							
konsensus	Diklat	5	71	2	29	0	0
konsensus	Prasarana Fisik	7	100	0	0	0	0
Konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	7	100	0	0	0	0

Sumber : Kuesioner penelitian.

 Tabel 4.8: Rekapitulasi pendapat *stakeholder* terhadap sub-kriteria pada kriteria *Education*

Perbandingan							
Elemen pembanding	Elemen yg dibandingkan	Elemen pembanding lebih penting	(%)	Sama penting	(%)	Elemen yg dibandingkan lebih penting	(%)
Pendidikan Formal							
konsensus	Diklat	2	29	4	57	1	14
konsensus	Prasarana Fisik	0	0	0	0	7	100
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	0	0	1	14	6	86
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0

Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Pendidikan informal							
konsensus	Diklat	0	0	3	43	4	57
konsensus	Prasarana Fisik	0	0	1	14	6	86
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	3	43	4	57	0	0
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0

Sumber : Kuesioner penelitian.

Tabel 4.9: Rekapitulasi pendapat *stakeholder* terhadap sub-kriteria pada kriteria PDBriil

Perbandingan							
Elemen pembanding	Elemen yg dibandingkan	Elemen pembanding lebih penting	(%)	Sama penting	(%)	Elemen yg dibandingkan lebih penting	(%)
Adopsi Teknologi							
konsensus	Diklat	0	0	0	0	7	100
konsensus	Prasarana Fisik	0	0	0	0	7	100
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	3	43	4	57	0	0
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Distribusi Pendapatan							
konsensus	Diklat	3	43	2	29	2	29
konsensus	Prasarana Fisik	6	86	1	14	0	0
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	5	71	2	29	0	0
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Permintaan Tenaga Kerja							
konsensus	Diklat	0	0	3	43	4	57
konsensus	Prasarana Fisik	0	0	1	14	6	86
konsensus	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Diklat	Prasarana Fisik	0	0	5	71	2	29
Diklat	Status Quo	7	100	0	0	0	0
Prasarana Fisik	Status Quo	7	100	0	0	0	0

Sumber : Kuesioner penelitian.

Berdasarkan rekapitulasi tersebut maka persepsi dari para responden dihitung dengan menggunakan matriks *Pariwise Comparisson* sehingga dapat diketahui bobot nilai prioritas dari masing-masing responden. Perhitungan matriks tersebut

dilakukan dengan bantuan program perangkat lunak *Expert Choice* demi alasan kecepatan dan ketepatan penghitungan. Hasil dari penghitungan tersebut kemudian dirata-rata secara geometris sehingga diketahui bobot total terhadap tiap kriteria dan prioritas alternatif yang ingin diteliti. Berikut ini adalah hasil penghitungan atau pembobotan para *stakeholder* beserta rata-rata geometrisnya terhadap kriteria dan sub-kriteria dari tujuan yang ingin diteliti (kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Jember) :

Tabel 4.10: Pembobotan pendapat *stakeholder* terhadap kriteria dan sub-kriteria

KRITERIA	SUB-KRITERIA	Sthd1	Sthd2	Sthd3	Sthd4	Sthd5	Sthd6	Sthd7	Rata-rata
<i>Life Expectancy</i>		0.10	0.11	0.14	0.13	0.12	0.17	0.09	0.12
	Sanitasi	0.09	0.14	0.08	0.12	0.12	0.21	0.16	0.12
	Pelayanan Kesehatan	0.51	0.44	0.57	0.41	0.60	0.43	0.40	0.48
	Akses Nutrisi	0.29	0.34	0.19	0.36	0.21	0.23	0.36	0.27
	Birth Control	0.11	0.08	0.15	0.11	0.07	0.13	0.08	0.13
<i>Education</i>		0.57	0.64	0.58	0.42	0.52	0.39	0.46	0.52
	Formal	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50	0.25	0.33	0.42
	Informal	0.75	0.50	0.25	0.75	0.50	0.75	0.67	0.58
PDB riil		0.33	0.26	0.28	0.46	0.36	0.44	0.46	0.36
	Adopsi teknologi	0.41	0.57	0.14	0.11	0.11	0.22	0.14	0.25
	Distribusi Pendapatan	0.48	0.32	0.43	0.64	0.64	0.32	0.28	0.48
	Permintaan tenaga kerja	0.11	0.11	0.43	0.26	0.26	0.46	0.58	0.28

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, diolah.

Kemudian dari data yang ada juga dihitung bobot pendapat para *stakeholder* terhadap prioritas alternatif kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Jember yaitu kebijakan konsensus bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, kebijakan investasi sarana dan prasarana fisik yang menunjang pembangunan manusia serta kebijakan status quo dalam menghadapi masalah pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Berikut ini adalah hasil pembobotan dan rata-rata geometrisnya :

Tabel 4.11: Pembobotan pendapat *stakeholder* terhadap prioritas alternatif

SUB KRITERIA	ALTERNATIF	Sthd1	Sthd2	Sthd3	Sthd4	Sthd5	Sthd6	Sthd7	Rata-rata
Sanitasi									
	Konsensus	0.20	0.14	0.19	0.24	0.23	0.20	0.23	0.20
	Diklat	0.12	0.22	0.17	0.10	0.13	0.18	0.13	0.14
	Prasarana Fisik	0.62	0.57	0.57	0.61	0.58	0.56	0.58	0.59
	Status Quo	0.06	0.07	0.08	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
Pelayanan Kesehatan									
	Konsensus	0.12	0.08	0.11	0.13	0.14	0.16	0.16	0.13
	Diklat	0.20	0.21	0.41	0.41	0.27	0.38	0.32	0.30
	Prasarana Fisik	0.62	0.67	0.41	0.41	0.54	0.41	0.48	0.49
	Status Quo	0.06	0.47	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
Akses Nutrisi									
	Konsensus	0.49	0.30	0.43	0.53	0.56	0.41	0.51	0.45
	Diklat	0.29	0.41	0.23	0.26	0.18	0.23	0.22	0.25
	Prasarana Fisik	0.17	0.23	0.29	0.16	0.20	0.30	0.22	0.22
	Status Quo	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Birth Control									
	Konsensus	0.51	0.38	0.55	0.44	0.55	0.52	0.56	0.50
	Diklat	0.28	0.42	0.27	0.38	0.27	0.26	0.26	0.30
	Prasarana Fisik	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.17	0.14	0.14
	Status Quo	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06
Formal									
	Konsensus	0.18	0.14	0.16	0.24	0.17	0.23	0.19	0.18
	Diklat	0.20	0.22	0.16	0.15	0.17	0.15	0.28	0.18
	Prasarana Fisik	0.58	0.59	0.62	0.56	0.62	0.57	0.48	0.57
	Status Quo	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
Informal									
	Konsensus	0.15	0.14	0.23	0.16	0.23	0.16	0.28	0.19
	Diklat	0.38	0.53	0.30	0.51	0.32	0.51	0.32	0.40
	Prasarana Fisik	0.41	0.28	0.41	0.28	0.40	0.28	0.32	0.34
	Status Quo	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07
Adopsi teknologi									
	Konsensus	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11
	Diklat	0.44	0.53	0.56	0.42	0.44	0.58	0.47	0.49
	Prasarana Fisik	0.38	0.31	0.28	0.42	0.38	0.27	0.37	0.34
	Status Quo	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Distribusi Pendapatan									
	Konsensus	0.61	0.58	0.41	0.29	0.21	0.38	0.49	0.40
	Diklat	0.22	0.20	0.30	0.49	0.53	0.40	0.30	0.35
	Prasarana Fisik	0.13	0.18	0.23	0.17	0.21	0.17	0.16	0.19
	Status Quo	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05

Permintaan Tenaga kerja									
	Konsensus	0.31	0.17	0.16	0.18	0.23	0.17	0.23	0.20
	Diklat	0.33	0.40	0.28	0.38	0.30	0.29	0.30	0.32
	Prasarana Fisik	0.31	0.38	0.51	0.38	0.41	0.49	0.41	0.42
	Status Quo	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

Sumber: Hasil kuesioner penelitian, diolah.

Berdasarkan pada rekap dan pembobotan dari pendapat para *stakeholder* diatas maka dapat diketahui sintesa tiap-tiap prioritas alternatif terhadap tujuan. Pembobotan tersebut diperoleh dari penjumlahan tiap alternatif kebijakan pada elemen-elemen sub-kriteria yang ada dengan dirata-rata terhadap jumlah elemen sub-kriteria yang diteliti. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 4.12: Prioritas alternatif *human development policy* di Kabupaten Jember

ALTER-NATIF	Sanitasi	Pelayanan Kesehatan	Akses Nutrisi	Birth control	Formal	Informal	Adopsi teknologi	Distribusi pendapatan	Permintaan tenaga kerja	Rata-rata
Konsensus	0.20	0.13	0.45	0.50	0.18	0.19	0.11	0.40	0.20	0.26
Pendidikan dan Latihan	0.14	0.30	0.25	0.30	0.18	0.40	0.49	0.35	0.32	0.30
Prasarana Fisik	0.59	0.49	0.22	0.14	0.57	0.34	0.34	0.19	0.42	0.37
Status Quo	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06

Sumber : tabel 4.11, diolah.

Berdasarkan uraian tabel 4.11 di atas, maka prioritas alternatif yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I : pembentukan investasi prasarana fisik yang menunjang pembangunan manusia dengan bobot 37 %;
2. Prioritas II : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat guna menunjang peningkatan mutu modal manusia dengan bobot 30%;
3. Prioritas III : kebijakan konsensus bersama guna mendukung terciptanya pembangunan manusia yang baik dengan bobot 26 %;
4. Prioritas IV : kebijakan status Quo dengan bobot 6%.

4.2.3 Pembahasan Hasil Penghitungan

4.2.3.1 Pembahasan Performasi *Human Development* di Kabupaten Jember

Hasil sintesa hirarki dari performasi *Human Development* menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Jember sebenarnya telah cukup baik. Kondisi tersebut lebih banyak ditunjang oleh kondisi perekonomian dan kondisi sosial politik di Kabupaten Jember sedangkan performasi kesehatan dan khususnya pendidikan masih memiliki rasio antara “performasi baik” dan “performasi cukup” yang cukup besar. Hal ini dikarenakan kesadaran manusia di Kabupaten Jember terhadap hal-hal yang tidak bersifat riil masih kurang mendapat perhatian lebih. Pemenuhan kebutuhan secara fisik dan berjangka pendek masih mendapat perhatian lebih. World Bank (1991:46) dalam laporannya memberikan suatu tolok ukur keberhasilan dari pembangunan manusia yaitu dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang bisa didukung oleh tiga hal, yaitu: pendidikan dalam arti luas, keterbukaan dan persaingan serta stabilitas makroekonomi. Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan sebagai suatu elemen yang sangat penting dalam upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu Djojohadikusumo (1994:131) mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan serta pelatihan menjadi dua bidang prioritas yang strategis-vital dan saling berkaitan sehingga dalam hal ini pendidikan menjadi suatu faktor yang sangat mempengaruhi performasi *Human Development* setidaknya dalam jangka panjang.

Salah satu pencapaian yang sangat baik sebagai sebuah upaya pengembangan *Human Development* di Kabupaten Jember adalah pemberantasan buta huruf, namun dari sisi intelektual akademis masih dirasa kurang sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Rasio guru dan murid menjadi sorotan penting dalam hal performasi *Human Development* di Kabupaten Jember. Terkait dengan hal itu adalah penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jember yang masih kurang secara kuantitas maupun kualitas.

Performasi ekonomi di Kabupaten Jember sudah cukup bagus namun yang perlu mendapat perhatian lebih adalah penyerapan tenaga kerja dan pendapatan

perkapita yang memiliki rasio performasi baik dan cukup yang masih besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masih perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

Dilihat dari sisi performasi kesehatan di Kabupaten Jember, secara umum sudah sangat bagus. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena masih tingginya rasio performasi baik dan cukupnya adalah akses nutrisi bagi balita dan anak-anak serta akses air bersih bagi masyarakat dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan masyarakat menjadi elemen penting dalam pendukung kegiatan proses pembangunan karena dengan kondisi kesehatan yang prima maka kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.

Performasi sosial politik di Kabupaten Jember secara umum sudah sangat bagus. Hal ini dikarenakan pendidikan politik dan peningkatan kesadaran sosial masyarakat menjadi suatu komoditi yang terus diolah semenjak era Reformasi digelar dalam percaturan sosial politik di Indonesia sehingga sering mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun NGO yang ada.

4.2.3.2 Pembahasan *Human Development Policy* di Kabupaten Jember

Hasil penghitungan dari sintesa hirarki terhadap kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jember harus menitikberatkan kebijakan pembangunannya pada investasi fisik sarana dan prasarana yang menunjang pengoptimalan pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Hal ini oleh Tjokrowinoto (1996:25) disebutkan karena dilandasi oleh proses pergeseran paradigma pembangunan yang tadinya amat menekankan pada dimensi pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan sumber daya manusia (*growth cum-human resource development*). Rumusan GBHN 1993 juga memberikan gambaran yang jelas :

“Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada bidang ekonomis yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling

terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilakukan seiring, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional”.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa pergeseran serta keterkaitan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang semula memiliki keterkaitan subordinatif menjadi keterkaitan komplementer.

Realisasi anggaran pembangunan yang dapat dikonsentrasikan sebagai upaya pembangunan manusia ini adalah pada pengeluaran pembangunan khususnya pada bidang: sumber daya air dan irigasi; tenaga kerja; pendidikan, kebudayaan Nasional, Kepercayaan Tuhan YME, pemuda dan olah raga; kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja; serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara riil, berdasarkan sintesa hirarki upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan membangun prasarana sanitasi penyediaan air bersih, penambahan unit pelayanan kesehatan, pendidikan formal secara kuantitas maupun kualitas, serta penyediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Prioritas alternatif kebijakan kedua yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang mendukung pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat luas baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dalam pembangunan merupakan faktor produksi yang dominan dalam proses pembangunan (Schultz, 1968:39) sehingga upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu investasi pada bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan (Effendi, 1995:6). Penggunaan modal yang efisien dan efektif dapat mengembangkan proses akumulasi sumber daya manusia dalam arti menambah jumlah orang-orang yang ahli, berketrampilan, berpendidikan dan berpengalaman pada bidang-bidang yang menunjang proses pembangunan sehingga investasi modal seperti pendidikan dan pelatihan merupakan suatu investasi jangka panjang. Berdasarkan hasil sintesa hirarki kebijakan yang dapat dilakukan adalah terkait dengan bidang pendidikan informal bagi masyarakat sehingga proses ini dapat menjadi tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, proses adopsi teknologi untuk peningkatan pendapatan dan penunjang proses pembangunan sehingga dapat pula menjadi unsur pendistribusian pendapatan masyarakat. Pentingnya proses pendidikan dan pelatihan ini sangat menunjang proses pembangunan

menuju pertumbuhan yang stabil. Hal ini sesuai dengan pendapat Djojohadikusumo (1994:198) bahwa dengan semakin meningkatnya mutu kualitas angkatan kerja dalam hal ketrampilan teknis, keahlian profesional dan kecerdasan akademis maka semakin ringan beban tanggungan terhadap angkatan kerja yang ada sebelumnya.

Alternatif kebijakan yang menjadi prioritas ketiga adalah konsensus bersama seluruh elemen masyarakat. Proses kesepakatan secara bersama ini terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia yang tidak hanya tertuju pada konteks politik namun juga pada pemenuhan hak ekonomi seperti mendapatkan makanan, pendidikan, pekerjaan, perumahan ataupun kehidupan yang layak dan damai. Kesepakatan atas standar-standar nasional dalam pemenuhan hak-hak mereka dapat mengadung tiga unsur pokok yaitu pernyataan misi yang menetapkan landasan untuk kemitraan yang kreatif antara pemerintah-pemerintah daerah dan pusat serta dengan organisasi non-pemerintah, menentukan standar-standar pembangunan manusia yang harus dicapai oleh semua daerah, serta diskusi publik yang luas melalui pertukaran pemikiran dan informasi antar daerah dan antar institusi.

Berdasarkan sintesa hirarki *Human Development Policy*, kebijakan konsensus yang sesuai diaplikasikan pada akses nutrisi bagi balita dan anak-anak, pengaturan kelahiran serta distribusi pendapatan bagi masyarakat. Program psikologis massa ini dapat dilaksanakan melalui propaganda pemerintah terhadap tujuan konsensus bersama bagi pembangunan manusia. Proses konsensus bersama ini menjadi suatu bentuk kebijakan komplementer terhadap kebijakan lainnya sehingga secara psikologis dapat mendorong proses pembangunan manusia dan konsensus terhadap standar-standar nasional dapat menjadi bahan acuan dan target pemerintah dalam melaksanakan pembangunan manusia.

Proses kebijakan-kebijakan pembangunan yang menggunakan pendekatan pembangunan manusia di Kabupaten Jember setidaknya harus dapat mengkonsolidasikan produksi dan distribusi komoditas serta perluasannya berlandaskan pada kapasitas-kapasitas manusiawi. Titik terang dari dilaksanakannya pembangunan manusia di Kabupaten Jember ini adalah bahwa

peningkatan mutu berpikir jelas merupakan awal dari pada peningkatan mutu tindakan (Hasibuan, 1996:27) sehingga manusia di Kabupaten Jember (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat menjadi sumber utama kreativitas dan pertumbuhan dalam pembangunan.





V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data dan pembahasan. Disamping itu, atas dasar kesimpulan yang disajikan, dapat diperoleh beberapa saran dalam mengatasi masalah pengembangan pembangunan manusia di Kabupaten Jember mengingat dengan semakin kompleksnya permasalahan globalisasi diperlukannya sumber daya manusia yang prima secara kualitas.

5.1 Kesimpulan

Performasi *Human Development* di Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan berdasarkan persepsi para ahli memberikan suatu kondisi yang masih cukup baik sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun kedepan sehingga dapat menjadi pendukung mantapnya pembangunan fisik dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kondisi yang masih perlu mendapat perhatian lebih banyak bagi pengembangan pembangunan manusia di Kabupaten Jember adalah rasio antara guru dengan murid serta kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Berdasarkan performasi yang ada, maka diperlukannya pengembangan *Human Development* di Kabupaten Jember melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah pembangunan manusia. Dari beberapa alternatif kebijakan yang dikeluarkan memerlukan prioritas kepentingan dan pelaksanaannya mengingat keterbatasan dana dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, prioritas kebijakan yang pertama adalah melalui kebijakan investasi sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan manusia seperti pembangunan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja baru. Prioritas kedua adalah kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Alternatif prioritas kebijakan yang berikutnya adalah kebijakan konsensus bersama seluruh lapisan masyarakat, swasta dan pemerintah terhadap standar-standar minimum

pembangunan manusia di Kabupaten Jember sedangkan kebijakan yang tidak *feasible* adalah status quo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan proses wawancara, maka untuk pelaksanaan pengembangan pembangunan manusia di Kabupaten Jember ada beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat maupun peneliti lain, yaitu :

1. Pengembangan dan pencapaian jangka pendek :
 - a. Pembangunan dan terutama peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik lebih didahulukan daerah yang masih kurang mendapatkan pendidikan formal khususnya masyarakat miskin di pedesaan sehingga pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terjangkau;
 - b. pembangunan sarana kesehatan di pedesaan yang tidak memiliki atau kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang dan juga disertai dengan penambahan ahli kesehatan (dokter, bidan, perawat, mantri kesehatan, dll) di daerah pedesaan;
 - c. pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak akademis perguruan tinggi di Kabupaten Jember untuk melaksanakan pendidikan formal dan informal bagi masyarakat pedesaan yang termasuk dalam bagian kurikulum pendidikan maupun ekstra-kurikuler pendidikan di perguruan tinggi tersebut sehingga tercipta pelaksanaan pendidikan yang saling menguntungkan bagi pihak pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat;
 - d. pemerintah melalui otoritasnya dapat memberikan propaganda tentang konsensus bersama atas standar-standar pembangunan manusia bagi masyarakat sehingga masyarakat sendiri dapat mengetahui pentingnya arah-arrah kebijakan pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah;

- e. pemerintah dapat memperbaiki alokasi yang efisien dari pendanaan masyarakat miskin dengan target dan program yang jelas (pemangkasan jalur distribusi birokrasi);
 - f. melindungi masyarakat berpendapatan rendah dengan pendidikan dan pelatihan secara gratis terutama tentang ketrampilan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produksi yang telah dicapai;
 - g. meningkatkan kualitas pembinaan terhadap masyarakat desa oleh pemerintah dan NGO terutama tentang pentingnya pendidikan dan ketrampilan;
 - h. kemudahan akses informasi bagi masyarakat terutama di pedesaan mengenai pengembangan potensi daerah dan akses pasca produksi.
2. Pengembangan dan pencapaian jangka panjang :
- a. pembangunan suatu sentra agroindustri yang dapat mengolah produk primer dari pertanian sehingga selain menciptakan nilai tambah, sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya;
 - b. memperbaiki kondisi finansial dari pendidikan secara efisien dan adil termasuk desentralisasi pendidikan serta kemandirian finansial dari institusi pendidikan melalui usaha produksi sekolah sebagai salah satu pemberdayaan institusi pendidikan;
 - c. memperbaiki program kesejahteraan termasuk target pengurangan pendampingan masyarakat miskin secara berangsur-angsur sehingga tercipta kemandirian masyarakat;
 - d. menciptakan masyarakat madani terutama terhadap swasembada pangan dan pengembangan pribadi yang berkualitas;
 - e. membangun kapasitas dan kualitas institusional khususnya pegawai pemerintah dalam mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat;
 - f. memperbaiki dan meningkatkan standar kelayakan hak-hak manusia;
 - g. penciptaan konsep wahana berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika dalam proses transformasi masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat berwawasan IPTEK dan pengetahuan.

3. Faktor-faktor yang diteliti dan dijadikan hirarki dalam penelitian ini memiliki kemungkinan yang kurang mewakili dari pembangunan manusia yang dilaksanakan di Kabupaten Jember mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga penulis. Oleh karena itu, disarankan para peneliti lain yang memiliki ketertarikan terhadap bidang serupa dapat memberikan kontribusi komplementer terhadap tulisan skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI - Press.
- Anwar, Moh. Arsyad (ed). 1995. *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Azis, Iwan. J. 1992. *A Study of Decentralization Based on The Regional Perspective: The Application of "Analytic Hierarchy Process"*. Dalam EKI. Vol.39. No.4.
- Bartolo, Annamaria De. Oktober 1999. *Modern Human Capital Analysis: Estimation of US, Canada and Italy Earning Functions*. <http://www.unimib.it>.
- Canni, Agus H. 2000a. *Kajian Strategi GKSI – Forward Integration Dengan Analisis Multi Expert – Multi Criteria Decision Making*. Paper INSAHP 2000. Jakarta 23 –24 Agustus 2000.
- 2000b. *Kajian Rancangan Kerangka AHP Dalam Analisis Kemitraan Antara IPS dan Koperasi/KUD Susu di Indonesia*. Paper INSAHP 2000. Jakarta 23-24 Agustus 2000.
- Connolly, M. P. 14 April 2001. *Human Capital and Growth in the Post-Bellum South: A Separate but Unequal Story*. <http://www.econ.duke.edu>.
- Danim, Sudarwan. 1994. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1955. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT.Pembangunan.
- 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Effendi, Tadjuddin N. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: P.T. Tiara Wacana Yogya.
- Goeltom, Miranda S. 1997. *Kompetensi Profesi dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Kiat Indonesia*. <http://www.psi.ut.ac.id>.

- Harker, Patrick T. dan Luis G. Vargas. 1987. *Theory of Ratio Scale Estimation: Saaty's Analytic Hierarchy Process*. Management Science. Vol.33.No.11.
- Hartiningsih, Maria. 24 Januari 2002. *Laporan Pembangunan Manusia di Indonesia 2001 Supaya Tidak Membangun di Atas Pasir*. <http://www.kompas.com>.
- Haryanto. 2000. *Pembobotan Nilai Proyek Dan Nilai Pelaksana Pada Usulan Pengembangan Institusi Perguruan Tinggi Dengan Proses Hierarki Analitik (AHP)*. Paper INSAHP 2000. Jakarta. 23-24 Agustus 2000.
- Hasibuan, Sayuti. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Heidar, Abdullah. 1992. *Laporan Penelitian: Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Laju Pembangunan Pedesaan Jawa Timur (Studi Kasus Desa Andongsari dan Desa Antirogo Kabupaten Jember)*. Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Howard, Dick. James J. Fox dan Jamie Mackie (ed). 1997. *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Terjemahan Bambang Sumantri. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Irianto, J. 2001. *Isu-isu Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Jamli, Ahma i dan Jose R. Joesoef. 1999. *Analisis Konflik Indonesia-Jepang di dalam Pasar Otomotif: Penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Game Theory*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.14.No.3.
- Jhinghan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joesoef, Jose Rizal. 1998. *Analisis Konflik Indonesia-Jepang Di Dalam Pasar Otomotif: Penerapan Analytic Hierarchy Process*. Progam Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Gajah Mada. Tesis. Tidak Dipublikasikan.
- Kindleberger. 1958. *Economic Development, Asian Student Edition*. Tokyo: McGraw-Hill.

- Kintarso, Harry. 2000. *Developing An AHP Advantages Approach*. Paper INSAHP 2000. Jakarta. 23-24 Agustus 2000.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Komaruddin. 1985. *Pengantar Untuk Memahami Pembangunan, sebuah catatan kecil*. Bandung: Angkasa.
- Kusumaningsum, Arsanti D. dan Kadarsah S. 2000. *Pengembangan Model Pengukuran Kesepakatan Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Kelompok*. Paper INSAHP 2000. Jakarta 23 – 24 Agustus 2000.
- Mahi, Raksaka. 1991. *Proses Analisa Hierarchy*. Jakarta: PAU-SE-UI.
- Mulyono, Sri. 1988. *AHP Suatu Metode Baru Yang Serba Guna*. EKI. Vol.36.No.3.
- Purbangkoro, Murdijanto. 1991. *Laporan Penelitian: Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Fasilitas Umum Terhadap Kematian Bayi di Kabupaten Jember, Jawa Timur*. Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Nugraha, R.Aga. 2000. *Alternatif Prioritas Kebijakan Pembangunan Dalam Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 di Kabupaten Jember: penerapan Analytic Hierarchy Process*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Pace, R. Wayne. Philip C. Smith dan Gordon E. Mills. 1991. *Human Resource Development: The Field*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Priatmono, Bambang. 2000. *Mengenal AHP Analisis Ulang Terhadap Studi Pemandangan Ibu Kota Kalimantan Selatan*. Paper INSAHP 2000. Jakarta. 23-24 Agustus 2000.
- Ramadhan, M. Arif. 1998. *Analisis Biaya-Manfaat Pelaksanaan Program Desentralisasi Di Propinsi DIY: Penerapan Analytic Hierarchy Process*. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Riniati. 1991. *Perkembangan Beban Tanggungan Tenaga Kerja Formal di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember*. Pusat Penelitian Universitas Jember.

- Saaty, Thomas. 1986. *Axiomatic Foundation of The Analytic Hierarchy Process*. Management Science. Vol.32.No.7.
- 1991. *Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo.
- 1996. *How to Make Decision: The Analytic Hierarchy Process*. Makalah Lokakarya Aplikasi Metode Kuantitatif.Yogyakarta 5-10 September.
- Saaty, Thomas dan Luis G. Vargas. 1993. *Prediction, Projecting and Forecasting*. Second Printing.Massachussets: Kluwer Academic Publisher.
- Simanjuntak, P.J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE-UI.
- Schultz, T.W. 1968. *Economic Growth and Agriculture*. India: Tata Mc.Graw-Hill.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Subagiarta, I Wayan. 1994. *Laporan Penelitian: Transisi Demografi di Kabupaten Jember*. Pusat Penelitian Universitas Jember.
- 1995. *Laporan Penelitian: Mutu Modal Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Tingkat II Jember*. Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafi'I, Imam. 1986. *Kesempatan Kerja dan Tingkat Pendapatan di Sektor Informal (Studi Kasus di Kabupaten Jember, Jawa Timur)*. Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.Tesis. Tidak Dipublikasikan.

- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-pokok Kebijakanaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tambunan, Tulus. Desember 2001. *Human Development Index Pemahaman, Fungsi dan Metodologi Perhitungannya*. Jurnal Studi Indonesia.
- Teulings, C. dan Thijs Van Rens. April 2002. *Education, Growth and Income Inequality*. <http://www.tinbergen.nl>.
- Thamrajakshi, R. 1988. *Human Resource Development in Asia Countries: An Integrated Approach*, New Delhi: UNDP.
- The World Bank. 1991. *World Development Report 1991: The Challenge of Development*. New York: Oxford University Press.
- Tjiptoherjanto, Prijono. 1999. *Population Issues in The Economics Development*. Jakarta: LPFE-UI.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, M.P.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi Ketujuh, Jilid1*. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 2002. *Human Development Report 2001*. <http://www.undp.org/hdr2001>.
- UNDP. 2002. *Indonesia Human Development Report 2001*.<http://www.undp.go.id>
- Wagito, dkk. 1988. *Penyusunan Kualitas Lingkungan Sehubungann Dengan Keberadaan Lingkungan Binaan (Man Made Invironment) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur*. Universitas Jember. Laporan Penelitian. Tidak Dipublikasikan.
- Witdarmono, H. 28 Juni 2000. *Amartya Sen dengan Konsep Pembangunannya*. Jakarta: Kompas.

LAMPIRAN



Lampiran 1: Data Human Development Index di Propinsi Jawa Timur Tahun 1996 dan Tahun 1999

Kabupaten / Kodya	Life Expectancy (Year)		Adult Literacy rate (%)		mean years schooling (Year)		ppp (ribu Rupiah)		HDI		HDI Ranking		HDI reduction shortfall
	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	
	01. Pacitan	68.2	69.8	77.7	80.8	5.0	5.3	586.5	582.8	67.1	63.9	145	
02. Ponorogo	66.0	66.6	73.6	75.7	5.0	5.3	581.7	575.7	64.5	60.4	206	248	-2.3
03. Trenggalek	68.9	69.4	82.5	87.2	5.1	5.7	579.0	579.7	68.0	65.2	120	115	-2.1
04. Tulungagung	70.0	70.1	86.6	85.0	5.8	6.1	593.0	586.5	71.1	65.9	56	96	-2.6
05. Blitar	66.9	68.5	82.5	82.4	5.2	5.7	591.1	581.9	67.9	63.8	122	159	-2.3
06. Kediri	66.2	67.8	79.3	85.6	5.5	6.3	588.1	577.2	66.8	64.2	153	148	-2.0
07. Malang	64.6	66.3	80.9	84.2	5.1	5.5	587.9	577.4	65.9	62.4	172	203	-2.2
08. Lumajang	63.2	64.9	72.6	77.2	4.6	5.2	591.8	575.0	63.2	59.7	234	256	-2.1
09. Jember	58.8	59.7	68.9	72.5	4.4	4.4	581.9	570.4	59.1	54.9	271	276	-2.2
10. Banyuwangi	62.6	64.2	81.4	81.9	5.2	5.6	592.9	583.2	65.4	61.3	185	230	-2.3
11. Bondowoso	57.2	58.8	56.1	63.8	3.7	4.3	589.9	583.2	55.4	53.4	284	282	-1.7
12. Situbondo	59.6	61.3	63.2	64.4	4.3	4.4	595.4	582.3	59.2	54.8	270	277	-2.2
13. Probolinggo	56.8	58.5	65.8	68.3	3.9	4.1	586.2	580.7	57.2	53.8	279	280	-2.0
14. Pasuruan	59.6	61.3	76.1	83.0	4.7	5.3	584.4	571.6	61.5	58.9	252	261	-1.9
15. Sidoarjo	66.3	67.9	93.3	95.4	8.3	8.8	591.4	587.9	72.3	69.1	41	35	-2.3
16. Mojokerto	65.9	67.5	84.7	87.5	5.6	6.2	591.0	580.1	68.1	64.6	115	137	-2.2
17. Jombang	65.0	66.6	85.4	88.5	6.2	7.0	591.7	582.7	68.3	65.1	110	122	-2.2
18. Nganjuk	65.3	66.9	80.6	85.1	5.7	6.1	588.6	576.9	66.8	63.4	152	173	-2.2
19. Madiun	65.2	66.8	76.3	79.7	5.2	5.6	590.9	589.8	65.6	62.8	179	191	-2.0
20. Magetan	69.3	69.6	79.2	81.5	5.5	6.0	585.9	585.4	68.3	64.7	107	130	-2.2
21. Ngawi	65.3	67.0	74.5	79.4	4.6	5.3	593.1	580.5	65.0	61.9	193	217	-2.1
22. Bojonegoro	63.9	65.5	74.7	78.6	4.7	5.4	578.0	560.5	63.1	59.4	237	258	-2.2
23. Tuban	64.2	65.8	65.8	73.8	4.2	4.8	585.1	579.3	61.5	59.5	253	257	-1.7
24. Lamongan	64.8	66.4	76.2	80.3	4.9	5.7	583.3	577.4	64.5	61.8	209	221	-2.0
25. Gresik	65.7	67.3	86.1	91.3	6.3	7.6	587.9	580.1	68.6	66.4	95	86	-1.9
26. Bangkalan	59.2	60.9	56.1	63.0	3.2	3.7	575.0	563.6	55.0	52.4	285	283	-1.8
27. Sampang	55.0	56.7	44.0	54.9	2.1	2.5	562.3	564.3	48.2	47.3	290	292	-1.2
28. Pamekasan	59.4	61.1	65.0	72.7	4.2	4.6	579.6	565.4	58.2	55.5	275	274	-1.9
29. Sumenep	60.5	60.9	61.2	66.8	3.5	3.7	598.5	583.8	58.9	54.7	273	278	-2.2
30. Kediri	66.7	68.4	92.2	92.9	8.0	8.5	588.7	588.8	71.8	68.6	49	45	-2.2

Kabupaten / Kodya	Life Expectancy		Adult Literacy rate		mean years schooling		PPP		HDI		HDI Ranking		HDI reduction shortfall
	1996 (Year)	1999	1996 (%)	1999	1996 (Year)	1999	1996 (ribu Rupiah)	1999	1996	1999	1996	1999	
31.. Blitar	68.7	69.6	89.3	92.3	7.4	8.2	595.6	588.0	72.4	68.9	38	39	-2.3
32. Malang	64.5	66.2	90.8	94.4	8.4	8.6	595.0	590.0	71.1	68.0	58	60	-2.2
33. Probolinggo	65.8	67.5	84.1	86.2	6.7	7.1	600.5	581.7	69.5	65.1	82	120	-2.4
34. Pasuruan	62.5	64.1	85.8	87.7	6.5	7.1	596.2	583.0	67.5	63.6	130	164	-2.3
35. Mojokerto	69.7	70.0	92.1	93.5	8.2	8.4	605.1	575.7	74.9	68.6	10	46	-2.9
36. Madiun	68.4	69.1	91.0	91.7	8.3	8.7	599.8	585.3	73.6	68.7	24	44	-2.7
37. Surabaya	66.6	68.3	93.2	93.8	8.7	9.0	583.1	589.4	72.1	69.3	45	33	-2.2

Sumber: UNDP, 2001



Lampiran 2: Pembobotan kuesioner performasi Human Development di Kabupaten Jember

No Resp	Pendapatan /kapita		PDRB		PPP		Tenaga Kerja					
	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang			
1	0,41	0,37	0,22	0,54	0,30	0,16	0,49	0,31	0,20	0,54	0,30	0,16
2	0,41	0,48	0,11	0,51	0,38	0,11	0,37	0,50	0,14	0,41	0,48	0,11
3	0,42	0,46	0,13	0,39	0,44	0,17	0,41	0,33	0,26	0,43	0,43	0,14
4	0,41	0,48	0,11	0,51	0,38	0,11	0,41	0,33	0,26	0,39	0,44	0,17
5	0,41	0,48	0,11	0,54	0,30	0,16	0,41	0,33	0,26	0,41	0,48	0,11
6	0,30	0,35	0,35	0,33	0,34	0,33	0,33	0,37	0,31	0,33	0,38	0,30
7	0,30	0,38	0,32	0,32	0,35	0,33	0,33	0,37	0,31	0,33	0,38	0,30
8	0,24	0,55	0,21	0,32	0,35	0,33	0,26	0,50	0,25	0,39	0,44	0,17
9	0,41	0,48	0,11	0,39	0,44	0,17	0,37	0,50	0,14	0,33	0,38	0,30
10	0,24	0,55	0,21	0,32	0,35	0,33	0,37	0,50	0,14	0,39	0,44	0,17
11	0,24	0,55	0,21	0,39	0,44	0,17	0,41	0,33	0,26	0,39	0,44	0,17
12	0,30	0,38	0,32	0,39	0,44	0,17	0,33	0,37	0,31	0,33	0,38	0,30
13	0,18	0,58	0,23	0,21	0,55	0,25	0,26	0,50	0,25	0,17	0,47	0,36
14	0,17	0,44	0,39	0,25	0,41	0,33	0,33	0,41	0,25	0,16	0,54	0,30
Rata-rata	0,33	0,46	0,20	0,37	0,39	0,21	0,36	0,39	0,23	0,34	0,42	0,23

Lanjutan Lampiran 2

No Resp	Mortalitas		Air bersih		Nutrisi		Kondisi Rumah		Fasilitas Kesehatan			
	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang
1	0,55	0,24	0,21	0,24	0,55	0,21	0,33	0,53	0,14	0,30	0,54	0,16
2	0,55	0,24	0,21	0,24	0,55	0,21	0,24	0,38	0,15	0,30	0,54	0,16
3	0,41	0,33	0,26	0,24	0,55	0,21	0,25	0,38	0,15	0,39	0,44	0,17
4	0,38	0,34	0,28	0,37	0,50	0,14	0,38	0,38	0,15	0,33	0,41	0,26
5	0,55	0,24	0,21	0,24	0,55	0,21	0,33	0,35	0,23	0,30	0,54	0,16
6	0,35	0,35	0,29	0,32	0,35	0,32	0,31	0,34	0,24	0,32	0,38	0,31
7	0,35	0,36	0,29	0,32	0,35	0,32	0,31	0,34	0,24	0,31	0,37	0,32
8	0,43	0,28	0,29	0,37	0,50	0,14	0,23	0,34	0,24	0,30	0,54	0,16
9	0,38	0,34	0,28	0,24	0,55	0,21	0,31	0,38	0,15	0,30	0,54	0,16
10	0,43	0,29	0,28	0,24	0,55	0,21	0,33	0,35	0,23	0,39	0,44	0,17
11	0,35	0,36	0,29	0,32	0,35	0,32	0,31	0,38	0,15	0,39	0,44	0,17
12	0,38	0,34	0,28	0,37	0,50	0,14	0,24	0,38	0,15	0,39	0,44	0,17
13	0,43	0,28	0,29	0,32	0,35	0,32	0,24	0,34	0,15	0,39	0,44	0,17
14	0,55	0,26	0,19	0,25	0,50	0,25	0,16	0,27	0,24	0,31	0,37	0,32
Rata-rata	0,43	0,30	0,26	0,29	0,47	0,22	0,28	0,36	0,20	0,31	0,46	0,29

Lanjutan Lampiran 2

No Resp	Melek Huruf		Tkt. Pendidikan		Fasilitas Pendidikan		Rasio Guru - Murid					
	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang			
1	0,37	0,50	0,14	0,41	0,48	0,11	0,30	0,54	0,16	0,25	0,25	0,50
2	0,24	0,63	0,14	0,41	0,48	0,11	0,11	0,38	0,51	0,25	0,25	0,50
3	0,39	0,44	0,17	0,41	0,48	0,11	0,28	0,46	0,26	0,40	0,40	0,20
4	0,46	0,32	0,22	0,41	0,48	0,11	0,25	0,50	0,25	0,40	0,40	0,20
5	0,39	0,44	0,17	0,35	0,36	0,29	0,28	0,46	0,26	0,25	0,25	0,50
6	0,34	0,30	0,36	0,31	0,35	0,34	0,25	0,37	0,38	0,32	0,33	0,35
7	0,34	0,30	0,36	0,30	0,35	0,35	0,24	0,36	0,40	0,32	0,33	0,35
8	0,22	0,55	0,23	0,25	0,51	0,24	0,24	0,36	0,40	0,31	0,34	0,35
9	0,39	0,44	0,17	0,30	0,35	0,35	0,28	0,46	0,26	0,40	0,40	0,20
10	0,39	0,44	0,17	0,41	0,48	0,11	0,28	0,46	0,26	0,25	0,25	0,50
11	0,39	0,48	0,14	0,35	0,36	0,29	0,24	0,36	0,40	0,32	0,33	0,35
12	0,34	0,30	0,36	0,30	0,35	0,35	0,28	0,46	0,26	0,25	0,25	0,50
13	0,22	0,55	0,23	0,22	0,55	0,23	0,20	0,42	0,38	0,17	0,43	0,40
14	0,23	0,46	0,30	0,23	0,50	0,28	0,33	0,41	0,26	0,16	0,54	0,30
Rata-rata	0,33	0,46	0,21	0,32	0,46	0,21	0,25	0,43	0,32	0,28	0,34	0,36

Lanjutan Lampiran 2

No Resp	Kondisi Sosial		Kondisi Politik		Demokrasi		Kesetaraan Gender					
	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang	baik	cukup	kurang			
1	0,48	0,35	0,17	0,44	0,39	0,17	0,44	0,39	0,17			
2	0,39	0,44	0,17	0,44	0,39	0,17	0,44	0,39	0,17			
3	0,48	0,35	0,17	0,40	0,40	0,20	0,44	0,39	0,17			
4	0,48	0,35	0,17	0,39	0,44	0,17	0,52	0,36	0,12			
5	0,44	0,34	0,23	0,44	0,39	0,17	0,44	0,39	0,17			
6	0,36	0,31	0,33	0,39	0,44	0,17	0,45	0,32	0,23			
7	0,34	0,34	0,32	0,39	0,44	0,17	0,36	0,38	0,26			
8	0,39	0,44	0,17	0,39	0,44	0,17	0,52	0,36	0,12			
9	0,34	0,34	0,32	0,40	0,40	0,20	0,44	0,39	0,17			
10	0,34	0,34	0,32	0,39	0,44	0,17	0,30	0,38	0,32			
11	0,39	0,44	0,17	0,39	0,44	0,17	0,44	0,39	0,17			
12	0,36	0,31	0,33	0,44	0,39	0,17	0,45	0,32	0,23			
13	0,34	0,34	0,32	0,40	0,40	0,20	0,36	0,38	0,26			
14	0,26	0,50	0,24	0,33	0,41	0,26	0,23	0,53	0,24			
Rata-rata	0,38	0,37	0,25	0,40	0,42	0,18	0,41	0,39	0,19	0,36	0,46	0,18

Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menerima kuesioner ini. Pengisian kuesioner ini merupakan salah satu tahapan studi untuk mengetahui secara kualitatif yang ter-kuantitatif terhadap performasi (kinerja) dan prioritas pengembangan kebijakan pembangunan *Human Development* di Kabupaten Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menangkap aspirasi dari daerah terhadap performasi dan pengembangan *Human Development policy* di Kabupaten Jember. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini hanya digunakan sebagai bahan pembuatan tugas akhir (skripsi) pada Fakultas Ekonomi-Universitas Jember. Judul skripsi tersebut adalah “Performasi dan Pengembangan *Human Development Policy* di Jawa Timur Dengan Pendekatan Model *Analytic Hierarchy Process* (studi kasus Kabupaten Jember)”.

Kesungguhan dalam mengisi kuesioner ini akan menjadikan hasil penelitian memiliki validitas tinggi sehingga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional terutama bagi kemajuan Kabupaten Jember tercinta. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner ini. Semoga sukses selalu menyertai Bapak/Ibu.

Jember, Oktober 2002

Hormat Kami,

Peneliti

(Widy Taurus Sandy)

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Misalkan kita akan membeli sebuah mobil, maka ada beberapa kriteria yang menentukan, yaitu:

- A. Model
- B. Keandalan mesin
- C. Efisiensi bahan bakar

Bapak/Ibu hanya diminta menjawab pertanyaan dengan membandingkan tiap kriteria terhadap kriteria yang lain, sehubungan dengan tujuan yang diteliti. Perbandingan antara-dua-elemen kriteria tersebut menggunakan skala preferensi (penilaian) sebagai berikut:

SKALA	DEFINISI	KETERANGAN
1	<u>Sama</u> pentingnya	A dan B <u>sama</u> pentingnya
3	<u>Sedikit lebih</u> penting	A <u>sedikit lebih</u> penting dibanding B
5	<u>Agak lebih</u> penting	A <u>agak lebih</u> penting dibanding B
7	<u>Jauh lebih</u> penting	A <u>jauh lebih</u> penting dibanding B
9	<u>Mutlak lebih</u> penting	A <u>mutlak lebih</u> penting dibanding B
2,4,6,8	<u>Nilai antara</u> angka diatas	Jika <u>ragu-ragu</u> menentukan skala, misalkan 6 untuk antara 5 dan 7
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah misalkan 9; maka B dibanding A adalah 1/9	Asumsi yang masuk akal

Bentuk dan cara menjawab pertanyaan, yaitu dengan menandai skala-skala yang sudah disediakan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut :

PERTANYAAN : Jika ingin membeli mobil, kriteria manakah yang paling ingin diprioritaskan menurut anda ?

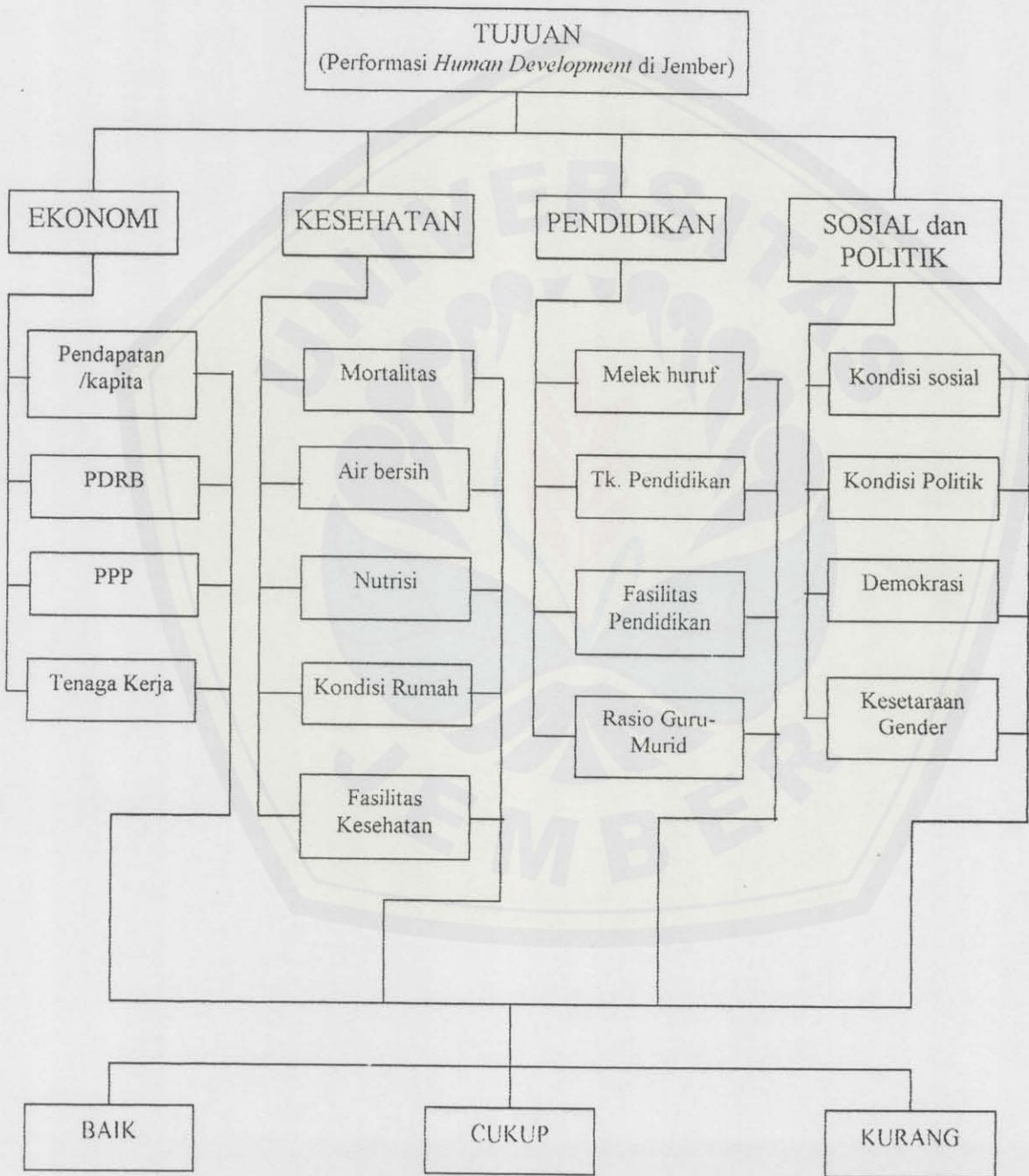
1.	Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keandalan mesin (B)
2.	Model (A)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)
3.	Keandalan mesin (B)	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)

Keterangan Jawaban :

- (1) Keandalan mesin (B) agak lebih penting dibanding model (A).
- (2) Model (A) sedikit lebih penting dibanding Efisiensi bahan bakar (C).
- (3) Keandalan mesin (B) dan Efisiensi bahan bakar (C) sama pentingnya.

Untuk membantu pengisian kuesioner, kami sediakan gambar hirarki dari performansi *Human Development* di Kabupaten Jember sebagai berikut :

Diagram hirarki
Performansi *Human Development* di Kabupaten Jember



Keterangan Diagram Hirarki :

Hirarki Level/Tingkat 1 :

Bidang-bidang yang terkait dengan performansi *Human Development* di Kabupaten Jember.

1. EKONOMI
2. KESEHATAN
3. PENDIDIKAN
4. SOSIAL dan POLITIK

Hirarki Level/Tingkat 2:

Sub Faktor yang terkait dengan level di atasnya.

1. Pendapatan /kapita : Pendapatan per-kapita masyarakat di Jember.
2. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto di Jember.
3. PPP : *Purchasing Power Parity* (Daya Beli masyarakat Jember).
4. Tenaga Kerja : Penyerapan tenaga kerja di Jember.
5. Mortalitas : Penurunan tingkat kematian di Jember.
6. Air Bersih : Akses air bersih bagi masyarakat di Jember.
7. Nutrisi : Akses nutrisi bagi balita dan anak-anak di Jember.
8. Kondisi Rumah : Kondisi standar rumah layak bagi masyarakat di Jember.
9. Fasilitas Kesehatan : Fasilitas Kesehatan bagi masyarakat Jember.
10. Melek Huruf : Penurunan angka melek huruf orang dewasa di Jember.
11. Tk. Pendidikan : Tingkat Pendidikan masyarakat Jember.
12. Fasilitas Pendidikan : Fasilitas pendidikan di Jember.
13. Rasio guru-murid : Rasio guru dengan murid di Jember.
14. Kondisi Sosial : Kondisi sosial masyarakat di Jember secara umum.
15. Kondisi Politik : Kondisi perpolitik di Jember secara umum.
16. Demokrasi : Pelaksanaan demokrasi di Jember secara umum.
17. Kesetaraan gender : Kesetaraan gender di Jember.

Hirarki Level/tingkat 3:

Performansi *Human Development* yang telah dicapai di Jember:

1. BAIK
2. CUKUP
3. KURANG

KUESIONER

A. Bidang Ekonomi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi Pendapatan per-kapita masyarakat di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi Produk Domestik Regional Bruto masyarakat di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi Kemampuan Daya Beli masyarakat di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

B. Bidang Kesehatan

5. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan penurunan tingkat kematian di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

6. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan akses masyarakat terhadap air bersih di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUK. JP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan akses nutrisi bagi bayi, balita dan ibu hamil di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi rumah layak bagi masyarakat di Kabupaten Jember ?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

9. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

C. Bidang Pendidikan

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan pencapaian melek huruf orang dewasa di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan Rasio Jumlah Guru dengan Murid di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

D. Bidang Sosial dan Politik

14. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi perkembangan sosial masyarakat di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

15. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi perkembangan perpolitikan di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

16. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Jember?

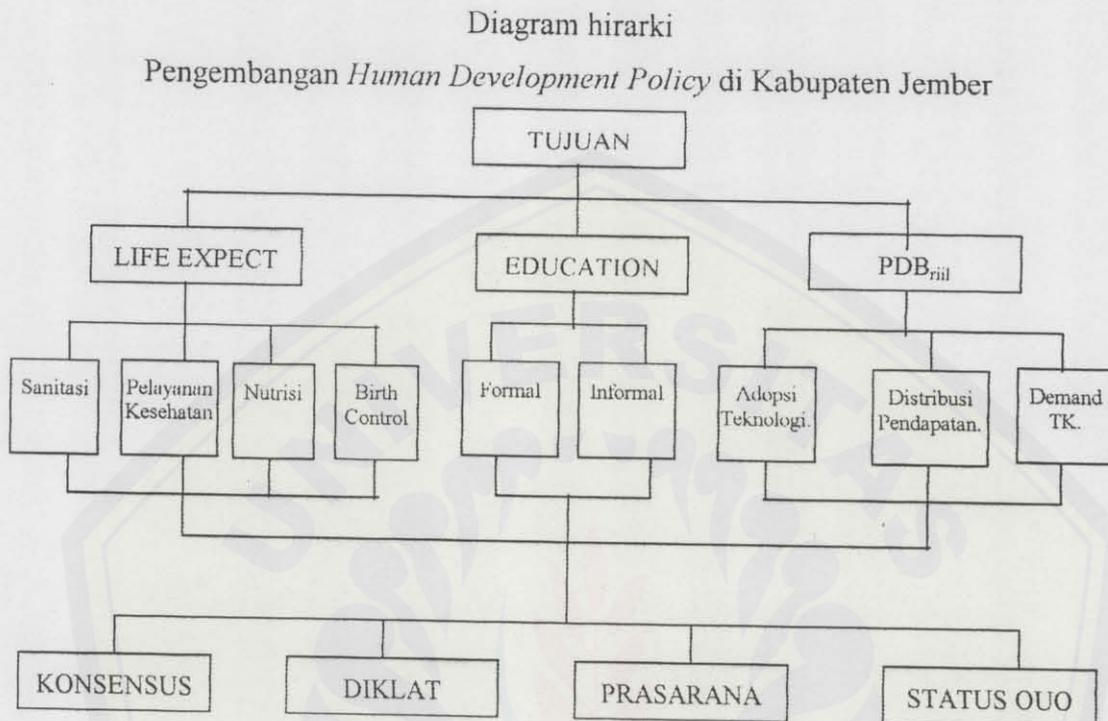
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

17. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah performasi yang paling sesuai untuk menggambarkan kesetaraan gender yang ada di Kabupaten Jember?

BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	CUKUP
BAIK	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG
CUKUP	9 7 5 3 1 3 5 7 9	KURANG

Nama Responden :	
Jabatan:	
Tanda tangan :	

Untuk membantu pengisian kuesioner, kami sediakan gambar hirarki dari performansi *Human Development* di Kabupaten Jember sebagai berikut :



Keterangan diagram:

Hirarki Level 1 :

Indikator pembangunan manusia :

1. LIFE EXPECT : Usia harapan hidup manusia.
2. EDUCT : rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa.
3. PDB_{riil} : tingkat pendapatan riil per-kapita.

Hirarki Level 2 :

Faktor – faktor yang mempengaruhi indikator pembangunan manusia :

- Sanitasi : akses terjangkaunya terhadap sanitasi.
- Pelayanan Kesehatan : akses terjangkaunya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Nutrisi : akses terjangkaunya nutrisi bagi balita dan anak-anak.
- Birth Control : Pengaturan kelahiran yang terencana pada keluarga
- Formal : pendidikan formal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

- Informal : pendidikan informal yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- Adopsi Teknologi : kemampuan masyarakat mengadopsi teknologi .
- Distribusi Pendapatan : pemerataan pendapatan dalam sistem pasar .
- Demand TK. : permintaan tenaga kerja dalam sistem pasar.

Hirarki Level 4:

Alternatif program kebijakan pembangunan yang dianggap penting bagi pengembangan pembangunan manusia di Jawa Timur:

- KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

KUESIONER

1. Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah dikategorikan dan dihitung dari tiga kriteria yaitu :

- (1) Life Expectancy : kondisi lamanya harapan hidup manusia dalam setiap kelahiran hidup (aspek kesehatan manusia).
 (2) Education : tingkat pendidikan manusia dewasa (aspek pendidikan).
 (3) PDB riil : tingkat pendapatan riil per-kapita masyarakatnya (aspek ekonomi masyarakat).

Menurut Bapak/Ibu kriteria manakah yang paling signifikan dapat mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember ?

Life Expectancy	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Education
Life Expectancy	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PDB riil
Education	9 7 5 3 1 3 5 7 9	PDB riil

A. Kriteria Life Expectancy (tingkat harapan hidup)

2. Menurut Bapak/Ibu faktor manakah yang paling menentukan tingginya performasi dari tingkat harapan hidup manusia di Kabupaten Jember ?

Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Pelayanan Kesehatan
Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nutrisi
Sanitasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control
Pelayanan Kesehatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nutrisi
Pelayanan Kesehatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control
Nutrisi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Birth Control

Keterangan variabel:

- Sanitasi : Akses masyarakat Jember kepada air bersih.
 Pelayanan Kesehatan : pelayanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat Jember.
 Nutrisi : Akses nutrisi bagi bayi, balita dan ibu hamil di Jember.
 Birth Control : pengaturan kelahiran yang terencana.

3. Dengan kualitas dan kondisi sanitasi (akses air bersih) yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

4. Dengan kualitas dan kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.

(4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

5. Dengan kualitas dan kondisi akses **nutrisi** bagi bayi, balita dan ibu hamil yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

(1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.

(2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.

(3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.

(4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

6. Dengan kuaritas dan kondisi **pengaturan kelahiran terencana** yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

(1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.

(2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.

(3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.

- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

B. Kriteria Pendidikan (*Education*)

7. Menurut Bapak/Ibu bentuk manakah yang paling menentukan tingginya performasi dari tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Jember ?

Formal	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Informal
--------	-------------------	----------

Keterangan variabel:

- (1) Formal : pendidikan formal yang diterima oleh masyarakat Jember.
 (2) Informal : pendidikan informal yang diterima oleh masyarakat Jember.

8. Dengan kualitas dan kondisi pendidikan formal yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
 (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
 (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
 (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

9. Dengan kualitas dan kondisi **pendidikan informal** yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

C. Kriteria PDB riil per kapita

10. Menurut Bapak/Ibu faktor manakah yang paling menentukan tingginya performasi dari **tingkat PDB riil per kapita** di Kabupaten Jember ?

Adopsi Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Distribusi Pendapatan
Adopsi Teknologi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Demand Tenaga Kerja
Distribusi Pendapatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Demand Tenaga Kerja

Keterangan variabel:

- (1) Adopsi Teknologi : kemampuan masyarakat mengadopsi teknologi .
- (2) Distribusi Pendapatan: pemerataan pendapatan dalam sistem pasar .
- (3) Demand TK. : permintaan tenaga kerja dalam sistem pasar.

11. Dengan kualitas dan kondisi Adopsi teknologi untuk berproduksi di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

12. Dengan kualitas dan kondisi distribusi pendapatan yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

13. Dengan kualitas dan kondisi permintaan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan manakah yang paling diinginkan/diprioritaskan dalam upaya mencapai peningkatan mutu kualitas *Human Development* di Kabupaten Jember ?

Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Diklat
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Konsensus	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Prasarana
Diklat	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo
Prasarana	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Status Quo

Keterangan Variabel:

- (1) KONSENSUS : kebijakan konsensus bersama semua elemen mengenai pentingnya pembangunan manusia melalui penetapan standar mutu nasional.
- (2) DIKLAT : kebijakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat Jember.
- (3) PRASARANA : kebijakan investasi prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, informasi dan transportasi di Jember.
- (4) STATUS QUO : kondisi sekarang sudah cukup baik dan tidak perlu untuk dirubah.

Nama Responden :	
Jabatan:	
Tanda tangan :	

